

**PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2004-2013**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI PEMBANGUNAN**

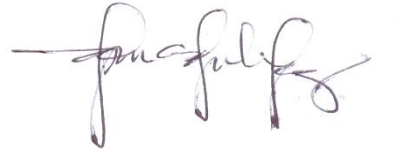


**DIAJUKAN OLEH
ANTON BUDI SATRIA
NIM: 041211131139**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

Surabaya, *21 September 2016*
Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Achmad Solihin, S.E., M.Si
NIP. 196904122002121001



SKRIPSI

**PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2004-2013**

DIAJUKAN OLEH:

ANTON BUDI SATRIA

NIM: 041211131139

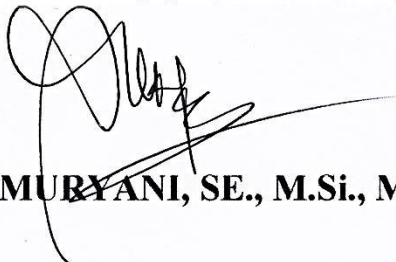
**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:
DOSEN PEMBIMBING,**



ACHMAD SOLIHIN, S.E., M.Si

TANGGAL *26 October 2016*

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. MURYANI, SE., M.Si., MEMD TANGGAL

26 October 2016 .

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Anton Budi Satria, 041211131139), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, *24 - October - 2016*



Anton Budi Satria
NIM 041211131139

DECLARATION

I, (Anton Budi Satria, 041211131139), declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the references.
3. This statement is true; if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya, *24 - October - 2016*



[Signature]

Anton Budi Satria
NIM 041211131139

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2013**”. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis tujukan kepada keluarga dan para sahabat yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terselesainya penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk penulis pada masa penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT atas ridho-Nya penulis diberi kesempatan untuk studi di perguruan tinggi hingga terselesaikannya penyusunan tugas akhir.
2. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu yang tidak pernah putus mendoakan yang terbaik untuk penulis serta berkenan mendengar keluh kesah penulis. Serta kakak yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Achmad Solihin, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk semua saran dan ilmu yang penulis dapat selama bimbingan.
4. Dr. Rudi Purwono selaku dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi.
5. Dr. Muryani, S.E., M.Si, MEMD selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Ekonomi.
6. Prof. Dr. Dian Agustia, S.E., M.Si., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Airlangga. Sahabat-sahabat S1 Ekonomi Pembangunan Angkatan 2012.

8. Teman KKN-BBM ke 51 Universitas Airlangga Desa Balonggebang Kabupaten Nganjuk, Margo, Mas Jefri, Willy, Mbak Akub, Mbak Yeni, Endah, Indah L, Widiya, Erlinda, Tantia, dan Mbak Yuni.
9. Keluarga besar Organisasi Bidik Misi Universitas Airlangga Mas Prakuta CS, mbak Susi CS, teman-teman kabinet gemilang Reza, Sukartono, Saad, Fatihin, Dian, Alvi, Wanud, Andik, dan Uma. Teman-Teman Kementrian Kewirausahaan Kabinet Gemilang, Mas Juki, Riski, Agus, Inda, Rosi, Aini, Yulia, Dwi yang sudah memberikan support.
10. Teman-teman kontrakan Cilaw, Rahman, Agus, Dedi, Gugun, Handal, Wahyu, Khakim. Teman kos Mas Luhur, Mas Sifon, Naufal.
11. Teman kantor sekretariat IKA UA Mas Guritno, Mas Bagus, Mas Trisna, Pak. Budi W, Bu. Nungki, P. Akmal, P. Amang, P. Edi U yang sudah banyak memberikan motivasi dan dukungan
12. Teman bisnis “Ketan Susu Longhour” Faris, Aditya, Andre yang sudah banyak membagi pengalaman.
13. Teman terbaikku Asri Asma Ulfa mulai dari predikat mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir yang tidak pernah mengeluh dan menemani pada masa-masa sulit perjuangan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 24 Oktober 2016



Penulis

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
DAFTAR NO. :

ABSTRAK

SKRIPSI SARJANA EKONOMI

NAMA : ANTON BUDI SATRIA
NIM : 041211131139
TAHUN PENYUSUNAN : 2016

**PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA
TIMUR TAHUN 2004-2013**

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Analisis desentralisasi fiskal yang merupakan rasio pendapatan asli daerah dan total belanja daerah, serta menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari investasi pemerintah, dan pendidikan yang diimplementasikan dengan angka melek huruf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekonometrika. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama derajat desentralisasi (DF), derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF²), investasi pemerintah (INV_P), rasio Gini (GINI), rasio Gini kuadrat (GINI2) dan pendidikan (EDUC) secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara parsial derajat desentralisasi (DF), derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF²), investasi pemerintah (INV_P), rasio Gini (GINI), rasio Gini kuadrat (GINI2) dan pendidikan (EDUC) secara signifikan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menunjukkan adanya hubungan *hump-shaped*, yaitu derajat desentralisasi fiskal (DF) berpengaruh positif dan desentralisasi fiskal kuadrat (DF²) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampaui tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kondisi daerah dengan derajat desentralisasi fiskal yang terlampaui tinggi kebijakan desentralisasi fiskal justru menghambat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kata Kunci : Derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, hubungan *hump-shaped*, *Fixed Effect Model* (FEM)

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY

STUDY PROGRAM: ECONOMICS
LIST NO. :

ABSTRACT

GRADUATE ECONOMICS THESIS

NAME : ANTON BUDI SATRIA
NIM : 041211131139
YEAR OF PREPARATION : 2016

***INFLUENCE OF THE DEGREE FISCAL DECENTRALIZATION ON
ECONOMIC GROWTH OF THE DISTRICT/CITY IN EAST JAVA 2004-2013***

Abstract

This study aimed to analyze the influence of the degree of fiscal decentralization on economic growth of the district/city in East Java in 2004 until 2013. The analysis focused on the fiscal decentralization which is the ratio of local revenue and the total local expenditure, as well as control variable consisting of government investment, and education which is implemented by the literacy rate. The method used in this research is the econometric approach. The model used in this study is the Fixed Effects Model (FEM) with methods Generalized Least Square (GLS). The results of this study indicate that jointly degree of decentralization (DF), the degree of fiscal decentralization squared (DF²), government investment (INV_P), Gini ratio (GINI), Gini ratio square (GINI2) and education (EDUC) significantly affect the economic growth of the district/city in Java East. Partially degree of decentralization (DF), the degree of fiscal decentralization squared (DF²), government investment (INV_P), Gini ratio (GINI), Gini ratio square (GINI2) and education (EDUC) also significantly affect the economic growth, and indicate a relationship hump-shaped, ie degrees fiscal decentralization (DF) and the positive effect of fiscal decentralization squared (DF²) negatively affect economic growth. That is, when the degree of fiscal decentralization is not too high, then the fiscal decentralization policy to boost economic growth, but in the Events area with a degree of fiscal decentralization that is too high fiscal decentralization policy would hamper economic growth districts/cities in East Java.

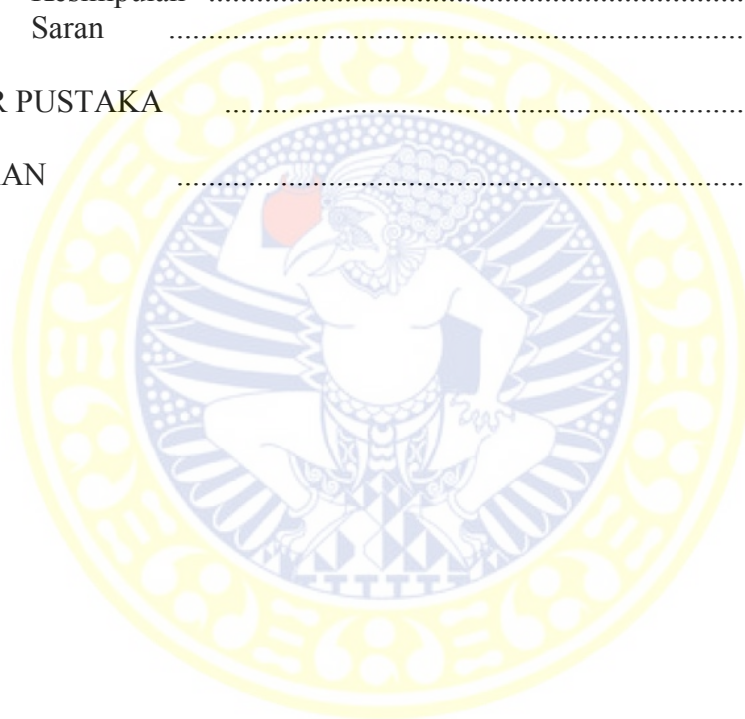
Keyword: degree of fiscal decentralization, economic growth, hump-shaped relation, Fixed Effect Model (FEM)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| DECLARATION | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 12 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 13 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.5 Sistematika Skripsi | 14 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Landasan Teori | 16 |
| 2.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi | 16 |
| 2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi | 19 |
| 2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik | 19 |
| 2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik | 20 |
| 2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Agregat | 21 |
| 2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru | 22 |
| 2.1.3 Desentralisasi Fiskal | 23 |
| 2.1.3.1 Tujuan Desentralisasi | 25 |
| 2.1.3.2 Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi | 26 |
| 2.1.3.3 Perkembangan Otonomi Daerah dan Desentralisasi ... | 28 |
| 2.1.3.4 Hubungan Desentralisasi dengan Pertumbuhan Ekonomi | 30 |
| 2.1.4 Investasi | 32 |
| 2.1.4.1 Teori-Teori Investasi | 35 |
| 2.1.4.2 Investasi Pemerintah | 38 |
| 2.1.4.3 Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi | 39 |
| 2.1.5 Ketimpangan Pendapatan | 41 |
| 2.1.5.1 Pengukuran Ketimpangan pendapatan | 42 |
| 2.1.5.1.1 Kurva Lorenz | 42 |
| 2.1.5.1.2 Rasio Gini | 43 |
| 2.1.5.2 Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi | 45 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.6 Pendidikan | 46 |
| 2.1.6.1 Hubungan pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi | 48 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 49 |
| 2.3 Hipotesis dan Model Analisis | 51 |
| 2.3.1 Hipotesis Penelitian | 51 |
| 2.3.2 Model Analisis | 52 |
| 2.4 Kerangka Berpikir | 52 |
| BAB 3 METODE PENELITIAN | 54 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 54 |
| 3.2 Identifikasi Variabel | 55 |
| 3.3 Definisi Operasional Variabel | 55 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 56 |
| 3.5 Prosedur Pengumpulan Data | 57 |
| 3.6 Teknik Analisis | 57 |
| 3.6.1 Metode Regresi Data Panel | 57 |
| 3.6.1.1 Pendekatan <i>Pooled Least Square</i> (PLS) | 59 |
| 3.6.1.2 Pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) | 60 |
| 3.6.1.3 Pendekatan <i>Random Effect Model</i> (REM) | 60 |
| 3.6.2 Pemilihan Model Estimasi Data Panel | 61 |
| 3.6.3 Pengujian Statistik | 63 |
| 3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R^2) | 63 |
| 3.6.3.2 Uji t-statistik | 64 |
| 3.6.3.3 Uji F-statistik | 64 |
| 3.6.4 Pengujian Asumsi Klasik | 65 |
| 3.6.4.1 Uji Heteroskedastisitas | 65 |
| 3.6.4.2 Uji Autokorelasi | 66 |
| 3.6.4.3 Uji Multikolinearitas | 67 |
| BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN | 69 |
| 4.1 Gambaran Umum Penelitian | 69 |
| 4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi | 69 |
| 4.1.2 Desentralisasi Fiskal | 72 |
| 4.1.3 Investasi | 74 |
| 4.1.4 Ketimpangan Pendapatan | 77 |
| 4.1.5 Tingkat Pendidikan | 79 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 81 |
| 4.3 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis | 81 |
| 4.3.1 Pemilihan Model Analisis Data Panel | 81 |
| 4.3.1.1 Uji Chow | 83 |
| 4.3.1.2 Uji Hausman | 85 |
| 4.3.2 Uji Asumsi Klasik | 86 |
| 4.3.2.1 Uji Multikolinieritas | 86 |
| 4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas | 87 |
| 4.3.2.3 Uji Autokorelasi | 88 |

| | | |
|---|--|------------|
| 4.3.3 | Generalized Least Square | 90 |
| 4.3.4 | Pengujian Statistik | 91 |
| 4.3.4.1 | Uji F-statistik | 91 |
| 4.3.4.2 | Uji t-statistik | 92 |
| 4.4 | Analisis Hasil dan Pengujian Hipotesis | 93 |
| 4.4.1 | Analisis Hasil | 93 |
| 4.4.2 | Analisis Hasil Hump-Shaped relation | 96 |
| 4.4.3 | Analisis Pembuktian Kurva U-terbalik | 98 |
| 4.4.4 | Pengujian Hipotesis | 100 |
| 4.5 | Pembahasan | 101 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN | | 108 |
| 5.1 | Kesimpulan | 108 |
| 5.2 | Saran | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 110 |
| LAMPIRAN | | 114 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Tahun 1903-2004.. | 29 |
| Tabel 2.2 | Tolak Ukur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia..... | 44 |
| Tabel 4.1 | Hasil Regresi <i>Pooled Least Square</i> (PLS), <i>Fixed Effect Models</i> (FEM), dan <i>Random Effect Models</i> (REM) | 82 |
| Tabel 4.2 | Hasil Uji Chow | 84 |
| Tabel 4.3 | Hasil Uji Hausman | 85 |
| Tabel 4.4 | Hasil <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF) | 87 |
| Tabel 4.5 | <i>Wald Test</i> | 88 |
| Tabel 4.6 | <i>Wooldridge Test</i> | 89 |
| Tabel 4.7 | Generalized Least Square (GLS) | 90 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|--|-----|
| Gambar 1.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2010-2013 | 2 |
| Gambar 1.2 | Rata-Rata Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 10 |
| Gambar 1.3 | Rata-Rata Angka Melek Huruf Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 11 |
| Gambar 2.1. | Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi | 41 |
| Gambar 2.1 | Kurva Lorenz | 42 |
| Gambar 2.2 | Kuznet Curve | 46 |
| Gambar 2.3 | Kerangka Berpikir | 53 |
| Gambar 4.1 | Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 70 |
| Gambar 4.2 | Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 73 |
| Gambar 4.3 | Rata-Rata Investasi Total Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 76 |
| Gambar 4.4 | Rata-rata Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 77 |
| Gambar 4.5 | Rata-Rata Rasio Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 78 |
| Gambar 4.6 | Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 dan 2013 | 80 |
| Gambar 4.7 | Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi | 97 |
| Gambar 4.8 | Rasio Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Jawa Timur tahun 2009-2010 | 102 |

BAB 1

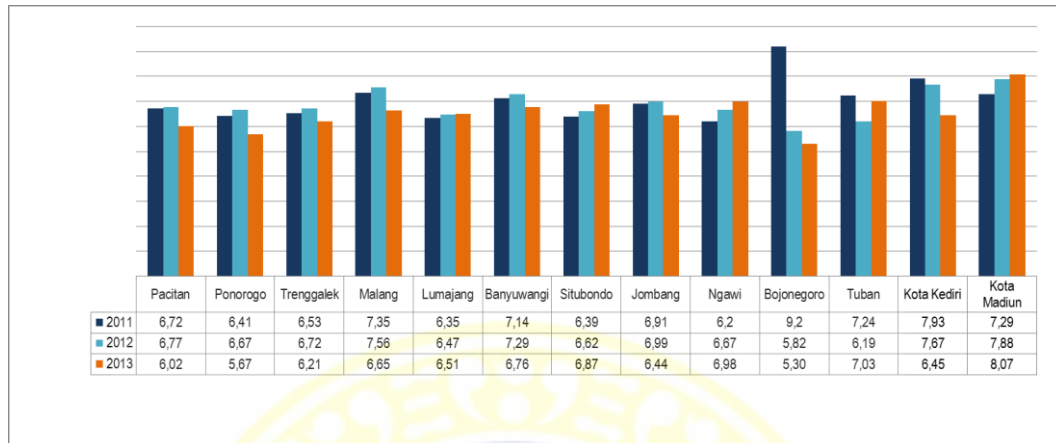
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur utama suatu negara atau daerah untuk melihat perkembangan perekonomian dari periode ke periode berikutnya. Teori pertumbuhan ekonomi Neo-klasik meyakini bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu yaitu peningkatan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi (Sukirno, 2000:451). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hasil nyata dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu daerah. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang apabila pencapaian output yang diterima dari kegiatan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya.

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah daerah di era sekarang ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bukti bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah memberikan dampak yang positif khususnya kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Secara empiris berdasarkan data yang ada, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan hasil yang positif meski terjadi sedikit penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,93 persen dan tahun 2013 sebesar 0,62 persen dibandingkan tahun 2012 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,27 persen. Kenaikan maupun penurunan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Secara lebih ringkas,

peningkatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten kota dapat dilihat dari grafik di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016)

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2010-2013 (dalam persen)

Tidak hanya di tingkat provinsi, pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten dan kota dapat diketahui bahwa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan meskipun ada fluktuasi kecil di beberapa kabupaten/kota. Berbeda halnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota yang terjadi pada tahun 2013. Pada Gambar 1.1 dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 justru banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 hanya lima kabupaten/kota diantaranya yaitu Kabupaten Lumajang, Situbondo, Ngawi, Tuban, dan Kota Madiun. Selain itu penurunan pertumbuhan ekonomi hampir terjadi di semua kabupaten/kota terkecuali lima kabupaten/kota yang dijelaskan di atas. Pada Gambar 1.1 penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yang lebih dari 0,5 persen terjadi di kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Jombang, Bojonegoro, dan Kota

Kediri. Selain itu kabupaten/kota lain di luar yang disebutkan juga mengalami penurunan pada tahun 2013 tetapi dibawah 0,5 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2013 tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional. Secara keseluruhan, perlambatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hanya berkisar antara 0 hingga 1, hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota masih dalam kondisi yang relatif tinggi dan stabil. Salah satu penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut seperti yang dijelaskan oleh kepala badan pusat statistik provinsi Jawa Timur Sairi Hasbullah (2014) yaitu karena adanya penurunan laju pertumbuhan di sektor pertanian di wilayah Jawa Timur. Sehingga kontribusi sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor utama pendorong peningkatan PDRB mengalami penurunan.

Melihat pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perekonomian, terutama terkait sektor-sektor utama yang berkontribusi besar terhadap output nasional maka perlu digali dan kembangkan. Pengelolaan sumberdaya di wilayah kabupaten/kota yang efektif dan efisien menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan bantuan untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui dana alokasi, untuk selebihnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Disinilah kontribusi pemerintah daerah dilihat sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan pengelolaan daerah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui UU nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU

nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta UU nomor 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tersebut menjadi dasar diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan lebih menekankan pada otonomi daerah yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun, mengatur, serta mengurus daerahnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi peluang bagi suatu daerah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah melalui peningkatan potensi daerah secara efisien baik dari sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki. Hakekat otonomi dan desentralisasi fiskal diterapkan tidak hanya menjalankan tugas dari pemerintah pusat, melainkan daerah benar-benar dituntut untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi daerah. Desentralisasi sendiri dipandang sebagai langkah atau cara untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Oates, 1993). Pada negara berkembang, Smith dalam Hidayat (2005) menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa negara berkembang menganggap penting peranan desentralisasi fiskal, diantaranya menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk memperluas otonomi daerah, dan sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kerap dikaitkan dengan besaran pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer yang diterima masing-

masing daerah. Besaran dana transfer yang diterima oleh masing-masing daerah memiliki kapasitas yang berbeda. Perbedaan dana transfer tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Suatu daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi tentunya akan mendapatkan pasokan dana transfer yang berupa dana alokasi umum (DAU) yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Tujuan dari pemberian dana transfer daerah ini menurut Sidik (2009) yaitu menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) dan kesenjangan vertikal (pusat ke daerah).

Hasil empiris dari beberapa penelitian yang dilakukan tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Zhang dan Zou (1998) dalam penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Desai *et al.* (2003) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2008) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Swasono (2007) menunjukkan hasil bahwa bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang negatif.

Melihat banyaknya perbedaan dari beberapa pendapat terkait pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, Breuss dan Eller (2004) menyatakan bahwa adanya efek ambivalent dalam hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Efek ambivalent yang dimaksudkan yaitu

sulitnya untuk menarik rekomendasi yang tepat tentang bagaimana desentralisasi yang optimal. Breuss dan Eller menyimpulkan bahwa belum adanya kejelasan, atau hubungan otomatis desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi lain mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi salah satunya dikemukakan oleh Thiessen (2003) yang melihat pengaruh desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hasil studi yang dilakukan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak berhubungan linear melainkan berbentuk kuadratik. Hubungan akan berbentuk *hump-shaped* apabila pada suatu daerah dengan derajat desentralisasi yang masih rendah maka kebijakan desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh yang positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada derajat desentralisasi yang sudah terlampaui justru kebijakan desentralisasi fiskal akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur salah satunya adalah investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Peran pentingnya investasi salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih tinggi sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang. Teori ekonomi makro menjelaskan bahwa investasi menjadi salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar juga menjelaskan bahwa, tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi memiliki hubungan timbal-balik yang positif dimana peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan

sebaliknya. Menurut Mishkin (2012) pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan produktivitas perkapita, investasi sumberdaya manusia, investasi fisik dan kesempatan kerja.

Dijelaskan juga dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) provinsi Jawa Timur (2014) beberapa faktor yang diindikasikan memberikan pengaruh besar terhadap tumbuh kembangnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, jangka waktu proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, dan persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Keadaan iklim investasi di Jawa Timur sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang baik. Data Badan Penanaman Modal provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan sebesar 8,7 persen dari tahun 2012. Peningkatan realisasi investasi ini memberikan kontribusi yang besar terhadap investasi nasional yaitu sebesar 68,5 triliun rupiah atau 17,2 persen terhadap investasi nasional.

Kontribusi investasi Jawa Timur terhadap investasi nasional ini tidak lepas dari dorongan pemerintah kabupaten/kota yang mengembangkan daerahnya untuk menarik para investor masuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Minat lokasi PMA dan PMDN tahun 2013 tertinggi yaitu di Kabupaten Gresik sebesar 14,67 triliun rupiah atau sekitar 21 persen, diikuti Kabupaten Probolinggo sebesar 14,43 triliun rupiah, Kabupaten Pasuruan sebesar 11,31 triliun rupiah atau sekitar

17 persen, dan kabupaten/kota yang lain masih di bawah 15 persen dari total investasi di Jawa Timur.

Selain investasi PMA dan PMDN yang menggunakan fasilitas, realisasi investasi PMDN non fasilitas per kabupaten/kota tahun 2013 juga memberikan kontribusi yang besar. Tingginya unit-unit usaha di kabupaten/kota dapat mendorong besarnya investasi. Kabupaten/kota dengan nilai investasi PMDN non fasilitas paling besar di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Dengan jumlah 10.150 unit usaha di Kota Surabaya dapat menghasilkan investasi sebesar 26,67 triliun rupiah, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan investasinya mencapai 10,54 triliun rupiah, Kabupaten Jember sebesar 7,19 triliun rupiah, dan kabupaten/kota yang lain besarnya investasi masih dibawah 3 triliun rupiah.

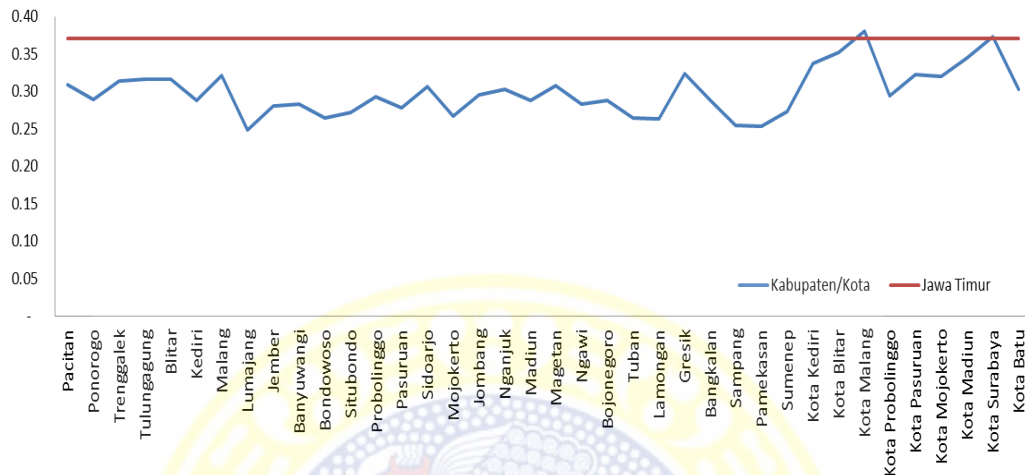
Pembangunan daerah meliputi wilayah kabupaten/kota yang berkelanjutan memiliki berbagai macam aspek yang mempengaruhi. Pembangunan ekonomi memiliki sifat multidimensional yaitu pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencakup kegiatan perekonomian, tetapi mencakup kegiatan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendidikan dan pemerataan pendapatan yang keduanya merupakan bagian dari pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat. Todaro dan Smith (2004: 21) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan struktural, sikap hidup, kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Lebih lanjut, kemajuan kesejahteraan ekonomi jika dibarengi dengan adanya

ketidakadilan ekonomi, tidak selalu mencerminkan kemajuan dan peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat (Kamaludin, 1998: 159).

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya juga dilihat dari pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang merata mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya wilayah kabupaten/kota. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, namun kenyataannya distribusi pendapatan sering dianggap tidak merata sehingga timbul masalah ketimpangan baik antar provinsi, kabupaten/kota, maupun antar desa dan kota. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan salah satunya dikarenakan kegiatan ekonomi yang hanya terpusat pada suatu daerah yang memiliki potensi besar baik dari sisi sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM), sehingga di daerah lain yang potensinya kurang akan mengalami ketimpangan. Lebih jelasnya berikut data indeks gini kabupaten/kota di Jawa Timur.

Rata-rata nilai indeks gini kabupaten/kota tahun 2009 hingga tahun 2013 relatif sedang kisaran antara 0,25 sampai 0,38. Nilai indeks gini yang sedemikian menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2013 tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masih rendah. Salah satu kabupaten/kota di Jawa Timur yang menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan paling rendah adalah Kabupaten Lumajang dengan rata-rata indeks gini sebesar 0,25 dan tertinggi yaitu Kota Malang dengan rata-rata indeks gini sebesar 0,38 diikuti dengan Kota Surabaya 0,37, sedangkan rata-rata indeks gini

Jawa Timur sendiri sebesar 0,37. Berikut rata-rata indeks Gini kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan 2013.

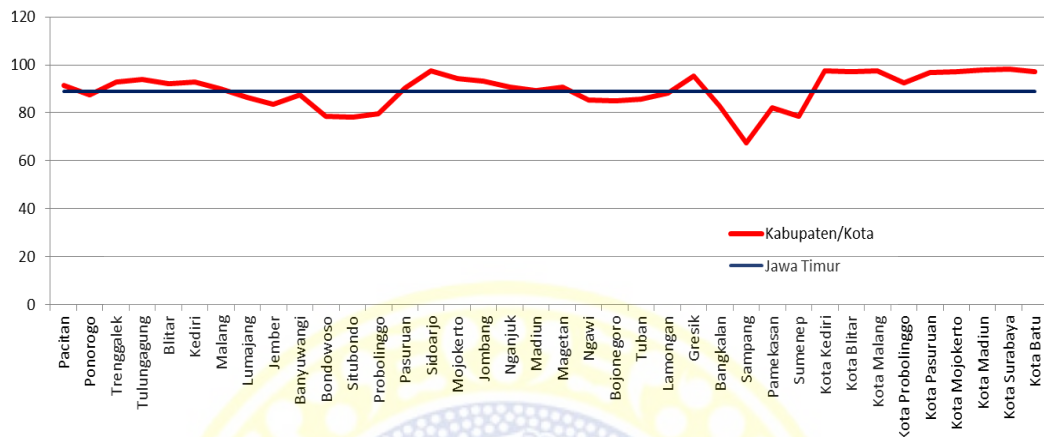


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2016)

Gambar 1.2
Rata-Rata Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya mengandalkan potensi sumberdaya alam dan modal yang ada, pertumbuhan ekonomi juga harus didorong dengan sumberdaya manusia yang produktif. Tanpa sumberdaya manusia maka seluruh kegiatan ekonomi juga tidak akan bisa berjalan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia salah satunya melalui perbaikan tingkat pendidikan. Semakin baik dan tinggi tingkat pendidikan sumberdaya manusianya menunjukkan sumberdaya manusia di daerah tersebut semakin produktif, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan output masing-masing daerah. Indikator pendidikan dapat dilihat melalui tingkat lama menempuh pendidikan dan angka melek huruf, dimana kedua merupakan komponen pembentuk IPM. Secara empiris berdasarkan data yang ada angka melek huruf di

kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata di atas 75 persen. Lebih jelasnya berikut data rata-rata angka melek huruf kabupaten/kota di Jawa Timur.



Sumber: Badan Pusat Statisti Provinsi Jawa Timur (2016)

Gambar 1.3 Rata-Rata Angka Melek Huruf Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013 (persen)

Rata-rata angka melek huruf selama periode 2009 hingga 2013 masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur secara umum di atas 75 persen terkecuali kabupaten Sampang. Rata-rata angka melek huruf Kabupaten Sampang hanya 67,4 persen jauh dibawah kabupaten/kota lain dan masih di bawah angka melek huruf provinsi, tetapi tren pertumbuhan angka melek huruf Kabupaten Sampang terus mengalami peningkatan. Tahun 2009 angka melek huruf Kabupaten Sampang sebesar 64,81 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 sebesar 69,47 persen. Sedangkan kondisi rata-rata angka melek huruf di 37 kabupaten kota yang lain masih relatif tinggi. Rata-rata angka melek huruf yang paling tinggi yaitu Kota Surabaya dengan rata-rata angka melek huruf sebesar 98,18 persen, diikuti Kota Madiun 97,86, Kota Malang 97,67, dan Kabupaten Sidoarjo 97,66.

Dampak diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sudah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pengembangan potensi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih jauh lagi sejauh mana peranan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur ini belum dapat diketahui. Derajat desentralisasi fiskal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur dapat dikatakan terlampau tinggi, atau derajat desentralisasi fiskal masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Dengan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, apakah terjadi hubungan *hump-shaped* di tingkat kabupaten/kota, serta melihat pengaruh faktor lain yang meliputi investasi, indeks gini, dan angka melek huruf terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004 hingga 2013.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. *Pertama*, adanya *research gap* dari penelitian terdahulu. *Kedua*, ingin mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal dan derajat desentralisasi fiskal kuadrat terhadap pertumbuhan ekonomi untuk melihat hubungan *hump-shaped*. *Ketiga*, ingin mengetahui secara bersama-sama pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, serta variabel kontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota. Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan angka melek huruf secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004-2013?
2. Bagaimana pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan angka melek huruf secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Melihat pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan angka melek huruf secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004-2013.
2. Melihat pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan angka melek huruf secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat ilmiah, mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat dan variabel kontrol yang meliputi investasi, indeks gini, dan angka melek huruf terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara bersama-sama maupun secara parsial kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004-2013.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi setiap pembaca, pengamat ekonomi, dan peneliti-peneliti lain yang tertarik ingin melakukan penelitian mengenai ekonomi publik yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah khususnya desentralisasi fiskal daerah.
3. Manfaat kebijakan, diharapkan dapat memberikan masukan sebagai referensi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan desentralisasi di daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima tahapan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan dari penulisan yang dilakukan, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori dari masing-masing variabel yang mendasari penelitian untuk memberikan gambaran dan pemahaman singkat terkait dengan penelitian yang dilakukan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini lebih menjelaskan pada langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal serta variabel pendukung lainnya seperti investasi, indeks gini, dan angka melek huruf di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur, deskripsi hasil pengujian, analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran yang diajukan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB 2**TINJAUAN PUSTAKA****2.5 Landasan Teori****2.5.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan perkembangan suatu perekonomian pada tahun ini dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi pada tahun sekarang lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya dan begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dikatakan turun apabila pertumbuhan ekonomi pada tahun sekarang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya. Perkembangan suatu perekonomian selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional, atau sering juga disebut Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006: 9).

Suatu daerah dengan tingkat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang berbeda pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu bukti keberhasilan dari pemerintah daerah dalam pengalokasian sumberdaya yang ada. Meier (1989) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama dari beberapa syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun dapat menggunakan rumus sebagaimana yang dijelaskan dalam Sukirno (2000:56) sebagai berikut:

$$g_t = \frac{Y^r_t - Y^r_{t-1}}{Y^r_{t-1}} \times 100 \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

- g_t = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (persen)
- Y^r_t = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun t (Rupiah)
- Y^r_{t-1} = pendapatan nasional (PDRB) pada tahun sebelumnya (Rupiah)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada skala regional dalam periode tertentu salah satunya melalui produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga bisa diartikan sebagai nilai dari jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit ekonomi. PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga konstan (riil) dan PDRB atas dasar harga yang berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan (riil) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Kamaluddin (1998:8) ada tiga pendekatan dalam perhitungan PDRB di Indonesia. Ketiga pendekatan tersebut adalah produksi, pendapatan dan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

Pada pendekatan produksi disebutkan bahwa PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi yang dimaksudkan dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha. Sembilan lapangan usaha tersebut antara lain pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintah. Dalam pendekatan ini yang dihitung hanyalah nilai barang dan jasa akhir atau nilai tambahnya dalam proses produksi dengan tujuan agar tidak terjadi perhitungan ganda.

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan menyatakan bahwa PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa PDRB adalah penjumlahan semua pengeluaran berbagai golongan pembeli atau konsumen dalam masyarakat.

Dalam cara ini, yang dihitung bukanlah nilai dari tiap transaksi diantara penjual dan pembeli melainkan hanya meliputi transaksi barang jadi (*final goods*) saja. Dalam analisis makroekonomi, berdasarkan sifat-sifat pengeluaran yang mereka lakukan, para pembeli dan konsumen dalam masyarakat dibedakan menjadi empat golongan : rumah tangga, pengusaha, pemerintah dan sektor luar negeri (ekspor dan impor). Sehingga menurut pendekatan pengeluaran, penjumlahan tersebut berasal dari nilai pengeluaran rumah tangga, pengeluaran para pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan pendapatan ekspor dikurangi dengan pengeluaran atas barang-barang impor.

2.5.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.5.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut Smith terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad,1999). Sukirno (2000:451) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada faktor-faktor produksi. Faktor produksi dianggap faktor yang penting karena sebelum mencapai peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didahului oleh peningkatan faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengalami peningkatan maupun penurunan tanpa adanya perubahan pada faktor produksi. Unsur pokok faktor produksi suatu negara ada tiga yang meliputi:

1. Ketersediaan sumberdaya alam, ketersediaan sumberdaya alam ini merupakan input mendasar dalam melakukan kegiatan produksi masyarakat yang jumlahnya memiliki batas maksimum bagi pertumbuhan.

2. Ketersediaan sumberdaya insani, maksudnya yaitu jumlah penduduk sebagai modal kebutuhan akan tenaga kerja dalam proses peningkatan output.
3. Stok modal yaitu sebagai salah satu input produksi yang menentukan seberapa besar tingkat pertumbuhan outputnya.

2.5.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan neo-klasik berkembang pada tahun 1950-an. Teori neo-klasik didasarkan sepenuhnya pada sisi penawaran berbeda dengan teori Harrod Domar yang menyatukan aspek permintaan dan penawaran dalam jangka panjang. Sebagaimana dinyatakan dalam hukum Say, dalam jangka panjang *supply creates its own demand* (Priyambodo, 1995:65). Model pertumbuhan ekonomi neo-klasik atau yang biasa disebut sebagai model pertumbuhan Solow dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada akumulasi modal dan pertumbuhan penduduk tetapi dalam model ini juga menitik pusatkan pada kemajuan teknologi. Tiga input utama dalam model Solow tersebut secara umum berbentuk fungsi produksi. Interaksi antara ketiga input produksi yang meliputi akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi akan menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan sebelum memasukkan input kemajuan teknologi. Model pertumbuhan neo klasik Solow interaksi dari ketiga faktor produksi tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T) \dots \dots \dots (2.2)$$

Dimana:

ΔY = tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK = tingkat pertambahan modal

ΔL = tingkat pertumbuhan tenaga kerja

ΔT = tingkat kemajuan teknologi

Tujuan dari persamaan diatas yaitu memperlihatkan faktor produksi yang meliputi pertumbuhan persediaan modal, angkatan kerja, serta kemajuan teknologi yang saling berinteraksi dalam suatu perekonomian, selain itu melihat bagaimana pengaruh yang diberikan terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan (Mankiw, 2003).

2.5.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Agregat

Seperti yang dijelaskan oleh Glasson (1997) pentingnya memperhitungkan faktor-faktor teori pertumbuhan jangka pendek untuk menjelaskan teori pertumbuhan regional pada jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan regional dalam jangka pendek diasumsikan konstan untuk menghitung pertumbuhan regional dalam jangka panjang. Faktor pertumbuhan regional jangka pendek meliputi pertumbuhan penduduk, tingkat upah, harga, teknologi, serta distribusi pendapatan. Sehingga Glasson membuat persamaan model sebagai berikut:

$$O_n = f_n(K, L, Q, Tr, T, So) \dots \dots \dots (2.3)$$

Dimana:

O_n = Output potensial dari daerah n

K = Modal (Capital)

L = Tenaga Kerja (Labor)

Q = Tanah (SDA)

Tr = Sumberdaya pengangkutan

T = Teknologi

So = Sistem Sosial Politik

Glasson (1997) juga menjelaskan pada model persamaan di atas lebih berorientasi dari segi penawaran dan memberikan penjelasan terkait output regional tertentu yang dapat dianalisis dengan sendiri-sendiri.

2.5.2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru

Teori pertumbuhan baru (*New growth Theory*) dipelopori oleh Paul M. Romer pada tahun 1986 dan Robert Lucas tahun 1988 sebagai bentuk kritikan terhadap teori pertumbuhan neo-klasik Solow. Teori pertumbuhan baru memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem.

Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994). Menurut Prijambodo (1995) teori pertumbuhan endogen timbul sebagai reaksi dari kekurangmampuan teori neo-klasik dalam membuktikan adanya tendensi konvergen, yaitu kecenderungan dimana semua negara di dunia akan mempunyai tingkat pendapatan perkapita yang sama.

Konvergensi akan menuntut negara industri maju pertumbuhannya akan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara miskin.

Pada awalnya, teori pertumbuhan endogen berkembang dalam dua cabang pemikiran. Pertama, mereka yang percaya bahwa *learning-by-doing* dengan introduksi hal-hal baru (yang bersifat eksternal) dalam perekonomian merupakan pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian. Kedua, mereka yang percaya bahwa penemuan-penemuan baru adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi. Kedua aliran ini sepakat bahwa SDM merupakan kunci utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi (Priambodo,1995:68).

2.5.3 Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep dasar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam Suparmoko (2001:9) adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang sedang dikehendaki, serta pemerintah pusat akan

memberikan bantuan dan ikut membantu memelihara kegiatan yang daerah kurang mampu dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya hakikat otonomi daerah yang berisi pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi) dan penyerahan urusan (desentralisasi) kepada suatu daerah yaitu sebagai bentuk demokratisasi politik dan upaya peningkatan pembangunan nasional di daerah. Pengertian desentralisasi sendiri menurut Nurcholis (2005: 9-10) mencakup berbagai bentuk antara lain :

1. Dekonsentrasi, yaitu penyerahan beban kerja dari kementerian pusat kepada pejabat daerah. Penyerahan ini tidak diikuti dengan kewangan dalam membuat suatu keputusan.
2. Devolusi, yaitu pelepasan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintahan baru yang tidak terkontrol secara langsung. Tujuan dari devolusi ini sendiri yaitu untuk memperkuat pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan cara mendelegasikan fungsi dan kewenangan.
3. Desentralisasi juga dapat dilakukan dengan cara pendelegasian pembuatan keputusan dan kewenangan administratif kepada prganisasi-organisasi yang melakukan fungsi-fungsi tertentu, yang dibawah pengawasan kementerian pusat.
4. Bentuk desentralisasi yang terakhir yaitu penyerahan fungsi dari pemerintah pusat ke pihak swasta atau privatisasi. Privatisasi adalah suatu pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan

swadaya masyarakat atau bisa juga peleburan badan pemerintah yang menjadi swasta.

2.5.3.1 Tujuan Desentralisasi

Pada negara berkembang, Smith dalam Hidayat (2005) menjelaskan terdapat tiga alasan mengapa negara berkembang menganggap penting peranan desentralisasi fiskal, diantaranya menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk memperluas otonomi daerah, dan sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat 5 prinsip dan tujuan dari pelaksanaan desentralisasi yaitu :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*Vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
3. Meningkatkan efisiensi sumberdaya nasional.
4. Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran.
5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Menurut Cokroamidjojo (1995:81) tujuan dilaksanakan kebijakan desentralisasi yaitu:

1. Dapat mengurangi beban kerja pemerintah pusat dan mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan yang

muncul di dalam daerah yang mana pemerintah daerah mampu mengatasi masalah itu sendiri.

2. Peningkatan pengertian masyarakat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Harapannya yaitu masyarakat lokal daerah dapat merasakan keuntungan dari adanya kegiatan ekonomi tersebut.
3. Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal dapat lebih realistis.
4. Pembinaan kesatuan nasional.

Ter-minassian (1997) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa program desentralisasi yang dilaksanakan merupakan bentuk evolusi politik yang menginginkan adanya suatu perubahan bentuk pemerintah yang lebih demokratis dan lebih mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut, Ter-minassian juga menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas serta menjamin adanya keterkaitan antara kualitas, kuantitas, dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat.

2.5.3.2 Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi

Desentralisasi dalam pelaksanaannya memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Seperti yang dijelaskan oleh Rossen (1999:481) keuntungan dilaksanakannya kebijakan desentralisasi antara lain:

1. Output yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.
2. Mendorong kompetisi antar daerah yang berimplikasi pada semangat dalam membangun daerah.

3. Mendorong terjadinya eksperimen dan inivasi bagi perkembangan masing-masing daerah.

Pelaksanaan desentralisasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang paling terpenting yaitu menggali segala sumberdaya di daerah untuk di optimalkan sehingga memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.

Disamping berbagai macam keuntungan diatas, desentralisasi dalam pelaksanaannya juga memiliki kerugian yaitu (Kaho, 1997:13-14) :

1. Besarnya organ-organ pemerintahan, menyebabkan struktur pemerintahan yang ada akan bertambah semakin kompleks sehingga koordinasi yang harus dijalankan semakin sulit. Akibat lain yang di timbulkan karena semakin banyaknya aparatur negara atau pegawai negri yaitu maka semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan, sehingga pengeluaran untuk pembangunan berkurang.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Terkhusus untuk desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya “daerah-isme”.
4. Pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang lebih muluk.
5. Dalam penyelenggaraannya, desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan akan sulit untuk dipertahankan keseragamannya.

2.5.3.3 Perkembangan Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Berita mengenai diterapkannya kebijakan otonomi daerah muncul sejak awal tahun 1990-an diantara para pemerhati pemerintahan. Undang-Undang yang menjelaskan desentralisasi politik dan otoritas administrasi pada masa orde baru yaitu Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang No.5 tahun 1974 ini terdapat dasar-dasar mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar-dasar mengenai hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tersebut yaitu (Kuncoro, 2004: 2):

1. Desentralisasi mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah.
2. Dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerahnya.
3. Tugas pembantuan yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, dengan fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Seiring perkembangannya, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia setiap periodenya selalu mengalami perubahan baik dari dasar hukum yang digunakan, maupun bentuk politik dan administrasinya. Desentralisasi lebih bisa dirasakan sejak orde reformasi, dimana sudah terjadi pembagian kewenangan di dalamnya. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 2.1 mengenai perkembangan otonomi daerah di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Tahun 1903-2004

| Periode | UU | Politik | Administratif | Fiskal | Indikator |
|----------------------------|---|--|---|--|----------------|
| Kolonial Belanda | UU 1903 | Delegasi kekuasaan kepada pemerintah daerah | Delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah | Delegasi kekuasaan memungut pajak | Desentralisasi |
| | UU 1922 | Delegasi kekuasaan terletak pada pemerintah provinsi | Delegasi kewenangan pada penduduk pribumi Jawa | | |
| Penjajahan Jepang | | Sentralisasi kekuasaan formal | Pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah pusat | Sentralisasi fiskal | Sentralisasi |
| Revolusi (1942-1945) | Konstitusi 1945 | Republik kesatuan | Delegasi | Pelimpahan fiskal | Sentralisasi |
| | UU No.22 Tahun 1948 | Delegasi prinsip-prinsip demokrasi | Kewenangan | | |
| | Kebijakan Belanda 1948-1949 | Negara Federal | Desentralisasi Administratif | Desentralisasi fiskal | Desentralisasi |
| Orde lama (1949-1956) | | Negara Kesatuan | Sentralisasi Administratif | Sentralisasi fiskal | Sentralisasi |
| | UU 1957 | Pembagian kekuasaan | Pelimpahan administratif | Sentralisasi fiskal | |
| | Dekrit presiden 1959 | Demokrasi terpimpin | Sentralisasi administratif | Sentralisasi fiskal | |
| Orde baru (1965-1998) | UU No.18 tahun 1965 | Pelimpahan kekuasaan | Sentralisasi administratif | Sentralisasi fiskal | Sentralisasi |
| | UU No.5 Tahun 1974 | Sentralisasi kekuasaan dibawah birokrasi sipil dan militer | Konsentrasi administratif | Sentralisasi fiskal | |
| Orde Reformasi (1999-2004) | UU No.22 dan 25 tahun 1999 serta UU No.32 dan 33 tahun 2004 | Pelimpahan kekuasaan demokratisasi, penguatan DPRD | Redistribusi kewenangan dan tanggung jawab | Pelimpahan pembelanjaan, sentralisasi penerimaan | Desentralisasi |

Sumber: Kuncoro, 2004:20

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diganti Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Di samping itu mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap diatur dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004. Hingga sekarang UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, masih dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan lebih menekankan pada otonomi daerah dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

2.5.3.4 Hubungan Desentralisasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Thiessen (2003) terdapat empat hal yang menjadi argumen dasar akan manfaat diterapkannya desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Berlakunya *diversification hypothesis*, dalam argumen ini menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik secara seragam itu menjadikan tidak efisien. Hal ini dikarenakan perbedaan waktu terhadap permintaan barang dan jasa publik lokal di setiap daerah. Peran desentralisasi disini yaitu sumberdaya yang ada dapat disimpan dan dimanfaatkan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah pada kurun waktu yang tepat.

2. *Leviathan restraint hypothesis*, yaitu pemerintah cenderung berorientasi tingkat pendapatan yang tinggi sehingga berpotensi merugikan para pembayar pajak (Brennan & Buchanan, 1980). Adanya persaingan horizontal maupun vertikal dalam pemerintahan yang berbeda dapat mencegah terjadinya maksimisasi pendapatan. Kebijakan desentralisasi fiskal disini dapat membatasi anggaran atas pengeluaran keseluruhan sektor publik, mencegah terjadinya inefisiensi sektor publik.
3. *Productivity enhancement hypothesis*, yaitu desentralisasi fiskal yang berupa pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat mendorong penduduk lokal secara aktif mencari inovasi dalam memproduksi maupun dalam penyediaan barang publik. Di samping itu timbulnya persaingan antar daerah dapat mendorong terjadinya efisiensi produksi. Dengan demikian desentralisasi fiskal dapat menciptakan efisiensi produksi atau *producer efficiency* yang lebih besar (Vazquez dan McNab, 2001).
4. Argumen politik, dimana desentralisasi akan mengurangi terjadinya konsentrasi kekuasaan politik, melemahkan pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan (*vested interest*) atas kebijakan publik, mendorong demokrasi, pembangunan, dan dalam jangka panjang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Hasil empiris beberapa penelitian mengenai hubungan derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi diantaranya penelitian yang dilakukan Zhang dan Zou (1998) di negara Cina pada tahun 1978-1992, Xie *et al*

(1999) di USA pada periode 1948-1994, Jin dan Zou (2005) di China dalam dua periode waktu yang berbeda yaitu tahun 1979-1993, ketiga hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil yang berbeda muncul dalam penelitian yang dilakukan oleh Thiessen (2003) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang di negara OECD periode 1973-1998 desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak berhubungan linear melainkan memiliki hubungan kuadratik yaitu:

$$Y = \alpha A + \beta A^2 \dots\dots\dots (2.4)$$

Hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi akan berbentuk *hump-shaped* jika hasil dari koefisien α positif dan koefisien β negatif. Hubungan *hump-shaped* terbukti dimana pada saat derajat desentralisasi masih rendah terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pada derajat desentralisasi yang lebih tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Argumentasi yang menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan derajat desentralisasi fiskal cenderung lebih banyak diterima. Hal ini diperjelas pada penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia Wibowo (2008) menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

2.5.4 Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan faktor strategis dalam menunjang suatu perekonomian. Banyaknya investasi yang direalisasikan didalam suatu negara mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi negara/daerah yang

bersangkutan, apabila jumlah investasi yang direalisasikan rendah maka menunjukkan kelambanan dalam pertumbuhan ekonomi. investasi berbeda dengan tabungan, tabungan biasanya dilakukan oleh orang per orang dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penabung, sedangkan investasi biasanya dilakukan oleh bisnis atau perusahaan dengan tujuan yang ditentukan oleh bisnis dan perusahaan itu sendiri (Rosyidi,1999).

Investasi atau modal dalam ilmu ekonomi lebih banyak di tinjau dari segi produktivitasnya sebagai hasil dari jenis-jenis modal atau dari segi pengaruhnya baik secara langsung dan tidak langsung dalam meningkatkan produksinya. Barang-barang modal dapat diklasifikasikan kedalam jenis-jenis sebagai berikut.

1. *Economic directly productive capital* yaitu barang-barang modal yang secara langsung dapat menghasilkan produk dalam proses produksi, contohnya: pabrik, mesin-mesin, lahan pertanian, dan barang-barang modal lainnya.
2. *Economic overhead capital* yaitu barang-barang modal yang menjadi dasar bagi perekonomian yang secara tidak langsung dapat menghasilkan dan meningkatkan produksi sehingga meningkatkan pendapatannya, contohnya: sarana transportasi, tenaga listrik, saluran irigasi dan lain-lain.
3. *Social overhead capital* yaitu barang-barang modal yang dijadikan sarana penting bagi keperluan-keperluan masyarakat yang secara tidak langsung bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi, contohnya: perumahan, rumah sakit, sekolah dan sarana sosial dan sarana umum lainnya.

Barang modal ini secara keseluruhan baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan memberikan kemungkinan untuk memperbesar tingkat produksi dan produktivitasnya. Secara khusus mengenai *overhead capital* baik *economic* maupun *social overhead capital* sering disebut sebagai prasarana atau infrastruktur, walaupun secara pengertian lebih banyak tertuju pada segi ekonominya (Kamaluddin, 1999).

Rosyidi (1999) menyatakan bahwa pengeluaran investasi menurut penggunaannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Konstruksi (*construction*)

Konstruksi adalah suatu bentuk pembangunan atau pendirian sesuatu yang baru atau belum pernah didirikan sebelumnya, seperti contohnya: bangunan pabrik, jalan raya, gedung, alat produksi lainnya, secara umum dan transportasi yang diperlukan oleh masyarakat banyak.

2. Rehabilitasi atau perbaikan (*rehabilitation*)

Rehabilitasi atau perbaikan adalah suatu bentuk pengeluaran investasi dalam hal perbaikan atau pemulihan kerusakan pada bangunan dan sarana prasarana fisik dalam menunjang kebutuhan masyarakat.

3. Ekspansi atau perluasan (*expansion*)

Ekspansi adalah suatu bentuk pengeluaran investasi yang digunakan untuk perluasan investasi, baik investasi fisik maupun investasi dalam bentuk uang.

2.5.4.1 Teori-Teori Investasi

Menurut Samuelson (2004), pertumbuhan investasi memegang peranan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, hal itu disebabkan oleh:

1. Investasi merupakan komponen pengeluaran yang sangat besar dan berubah-ubah dengan demikian perubahan yang cukup besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan berpengaruh pada output dan kesempatan kerja.
2. Investasi merupakan penghimpunan akumulasi modal melalui pembangunan sejumlah investasi fisik sehingga output potensial suatu negara akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat.

Investasi memainkan dua peranan penting yaitu menentukan jumlah output dan pendapatan. Menurut Samuelson (2004), Keputusan investasi tergantung pada:

1. Tingkat permintaan akan output yang dihasilkan investasi
2. Tingkat suku bunga dan pajak yang mempengaruhi biaya investasi.
3. Ekspektasi dan perkiraan kalangan usahawan atas situasi ekonomi dimasa depan.

Menurut Nopirin (1996), teori tentang investasi pada umumnya menjelaskan faktor-faktor atau variabel yang diduga sangat mempengaruhi investasi adalah tingkat bunga, penyusutan, kebijakan perpajakan, perkiraan tentang penjualan, dan kebijakan ekonomi.

Beberapa ahli lainnya juga mengemukakan tentang pentingnya investasi dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Jhingan (1999) investasi

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua sisi, yaitu: dari sisi permintaan, investasi akan menciptakan atau menghasilkan pendapatan (*return on investment*), sedangkan dari sisi penawaran investasi meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau akumulasi modal.

Lebih lanjut Todaro dan Smith (2004) mengemukakan bahwa akumulasi modal (*capital accumulation*) diperoleh jika sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan *output* dan pendapatan di masa depan. Dalam hal ini investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi produktif secara langsung (melalui pengadaan pabrik baru, mesin-mesin dan peralatan dan bahan baku baru), investasi dalam bentuk infrastruktur sosial dan ekonomi, dan juga investasi dalam sumber daya manusia untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja.

Berikut beberapa teori yang menjelaskan tentang investasi terhadap output tertentu yang membuktikan bahwa investasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap output suatu negara.

1. Teori Keynes

Menurut Suparmoko (1992:84) masalah investasi baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep *Marginal Efficiency of Investment* (MEI) yang menyatakan bahwa investasi akan dijalankan bila MEI lebih tinggi dari tingkat bunga. MEI digambarkan sebagai garis menurun yang menyatakan jumlah investasi yang akan dilaksanakan pada tingkat bunga tertentu. Menurut garis MEI, antara lain disebabkan oleh:

- a. Semakin banyak jumlah investasi yang dilaksanakan dalam masyarakat maka semakin rendah marginal efisiensi investasinya sebab adanya persaingan antar investor yang menyebabkan MEI turun.
- b. Semakin banyak investasi yang dilakukan maka biaya barang modal menjadi turun.

2. Teori Harrod-Domar

Menurut Harrod-Dommar setiap perekonomian pada dasarnya harus menyetor atau menabung suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau mengganti barang-barang modal yang mengalami penyusutan atau rusak, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal (*capital stock*). Dalam persamaan yang sederhana, teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dinyatakan dalam bentuk:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k} \dots\dots\dots (2.5)$$

Dimana s adalah rasio tabungan nasional dan k adalah rasio modal-output nasional. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional dan rasio modal-output nasional. Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan tersebut di atas sangatlah sederhana, yaitu: agar bisa tumbuh dengan cepat, setiap perekonomian harus menabung atau melakukan investasi sebanyak mungkin dari pendapatan nasionalnya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat (Todaro dan Smith, 2004).

3. Teori Pertumbuhan Solow

Teori pertumbuhan Solow menurut Mankiw (2003) menunjukkan bahwa pada setiap momen, persediaan modal merupakan determinan *output* perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan tersebut bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi, dan dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal tersebut adalah investasi dan depresiasi. Dalam hal ini investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru, dimana hal tersebut menyebabkan kenaikan persediaan modal. Sedangkan depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dimana hal tersebut menyebabkan persediaan modal berkurang.

2.5.4.2 Investasi Pemerintah

Menurut Rosyidi (1999:188) investasi pemerintah (*public investment*) adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Public investmen tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersifat personal, investasi ini bersifat impersonal. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya tingkat investasi lebih mengarah pada pelayanan dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat. *Private investmen* (investasi swasta) adalah investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta, sedangkan beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya investasi berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh dan prospek penjualan output dari nilai investasi.

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas kesempatan kerja. Investasi Pemerintah dapat diimplementasikan berupa belanja modal pemerintah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan baik dari pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

2.5.4.3 Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

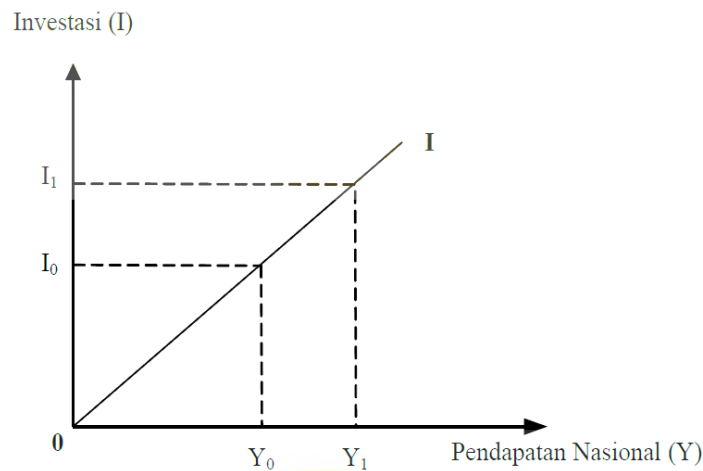
Investasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun suatu daerah. Penanaman modal atau investasi juga memberikan kontribusi yang besar dalam perluasan tenaga kerja. Alasan itulah yang menjadikan suatu daerah berusaha meningkatkan potensi daerah yang ada untuk menarik para investor masuk untuk menanamkan modalnya.

Todaro dan Smith (2004) menjelaskan terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara antara lain: akumulasi modal yang meliputi segala bentuk investasi didalamnya, pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahlian, serta kemajuan teknologi. Diperkuat lagi dari pendapatnya Sukirno (2000) bahwa kegiatan investasi dapat memungkinkan suatu masyarakat secara terus menerus meningkatkan kegiatan

ekonomi dan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan investasi memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian. *Pertama*, investasi merupakan komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi dapat meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. *Kedua*, penambahan barang modal sebagai akibat dari investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi dimasa depan yaitu akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional serta kesempatan kerja. *Ketiga*, investasi selalu diikuti dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Pendapatan nasional sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktanya, pertumbuhan ekonomi dilihat dari besar kecilnya pendapatan nasional yang diterima oleh negara. Adanya investasi mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kapital per tenaga kerja (perkapita) sehingga pendapatan nasional dapat meningkat. Hubungan investasi dengan pendapatan nasional pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan jumlah kapital perkapita maka pendapatan nasional akan meningkat dari (Y_0 ke Y_1) dan investasi akan meningkat dari I_0 ke I_1 .



Sumber: Sukirno, 2006:192

Gambar 2.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

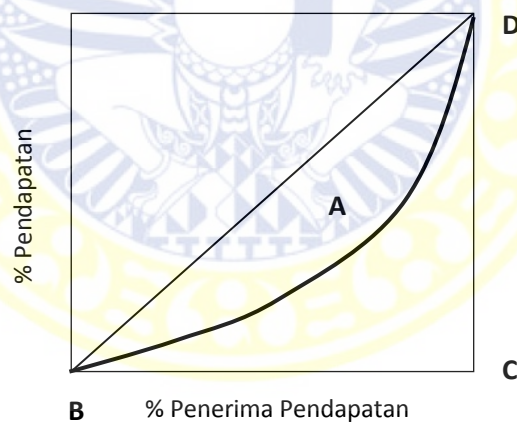
2.5.5 Ketimpangan Pendapatan

Pencapaian peningkatan pertumbuhan ekonomi salah satunya diukur melalui tingkat pendapatan masyarakat. Namun permasalahan yang sering muncul yaitu dari distribusi pendapatan yang kurang merata (disparitas pendapatan). Distribusi pendapatan sendiri merupakan pembagian hasil pembangunan yang diterima oleh seluruh lapisan-lapisan masyarakat. Harapannya yaitu hasil pembangunan yang berupa pendapatan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan antara golongan menengah keatas dan menengah kebawah. Tetapi kondisi yang ada menunjukkan bahwa di negara Indonesia distribusi pendapatan dapat dikatakan belum merata, terutama terdapat pada daerah pusat kota dan daerah rural. Sebagian besar pendapatan nasional dinikmati oleh sebagian kecil dari masyarakat yang menengah ke atas, dan sebagian kecil dari pendapatan nasional rata-rata dinikmati oleh masyarakat yang menengah ke bawah.

2.5.5.1 Pengukuran Ketimpangan pendapatan

2.5.5.1.1 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah penerima pendapatan dengan bagian dari pendapatan total yang diterima. Pada kurva Lorenz, jumlah penerima pendapatan digambarkan pada sumbu horisontal, tidak dalam arti absolut tetapi dalam persentase kumulatif. Sumbu vertikal menunjukkan bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase kelompok penduduk (Todaro dan Smith, 2004: 223-228). Garis diagonal menunjukkan “pemerataan sempurna (*perfect equality*)” dalam distribusi ukuran pendapatan. Semakin jauh jarak Kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (garis pemerataan sempurna), maka semakin tinggi derajat ketimpangan.



Sumber: Todaro (2003: 224)

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Pada kurva Lorenz terdapat tiga pembagian pendapatan, pertama, pembagian pendapatan yang merata mutlak (*perfect equality income distribution*), yaitu pendapatan semua orang sama, keadaan ini ditunjukkan oleh garis BD. Kedua, distribusi pendapatan nasional yang timpang mutlak (*perfect inequality*

income distribution) ditunjukkan oleh garis BCD. Yang ketiga, distribusi pendapatan actual (*actual inequality income distribution*) ditunjukkan oleh garis BAD.

2.5.5.1.2 Rasio Gini

Metode yang paling sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan (disparitas) distribusi pendapatan adalah rasio Gini dan kriteria bank dunia (Tadjoeddin, 2001:42). Rasio gini dalam rumusnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$RG = 1 - \sum fi(Y_i^* + Y_{i-1}^*) \dots \dots \dots (2.5)$$

Keterangan :

- RG = Koefisien gini rasio
- i = Jumlah kelas/golongan/kelompok pendapatan
- Y_i^* = Jumlah relatif kumulatif pendapatan pada kelas/golongan ke-i
- Y_{i-1}^* = Y_i^* kelas/golongan sebelum ke-i
- fi = Jumlah frekuensi relatif pendapatan yang digolongkan

Nilai dari rasio gini yaitu antara nol dan satu. Jika nilai dari rasio gini sama dengan nol menunjukkan bahwa terjadi distribusi pendapatan yang merata sempurna karena setiap penduduk menerima pendapatan dalam jumlah yang sama. Namun, jika nilai rasio gini menunjukkan satu maka terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna, karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai rasio gini maka

semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

Tolok ukur dalam melihat tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah pada umumnya nilai dari rasio gini lebih sering digunakan. Rasio gini sering digunakan dalam hal ini karena metode ini bisa dijelaskan ke dalam kurva Lorenz yang memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di suatu daerah. Jika didasarkan pada kurva Lorenz (Gambar 2.1), penghitungan koefisien gini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Gini} = \frac{\text{Luas Tembereng } BAD}{\text{Luas } \triangle BCD} \dots\dots\dots (2.6)$$

Menurut kriteria Bank Dunia penilaian akan distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah di jelaskan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tolak Ukur Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Menurut Kriteria Bank Dunia

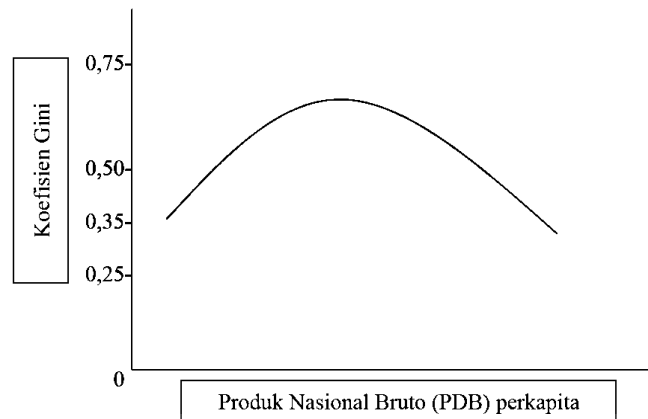
| Persentase Pendapatan yang Diterima Oleh 40% Penduduk Berpendapatan Terendah | Ketimpangan Distribusi Pendapatan |
|---|--|
| Lebih dari 17% | Ringan |
| Lebih rendah dari 17% tetapi di atas 12% | Sedang |
| Kurang dari 12% | Berat |

Sumber: Rosyidi (1999: 131)

2.5.5.2 Hubungan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi

Simon Kuznet menemukan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, hasilnya pada tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pada tahap yang selanjutnya ketimpangan pendapatan nasional akan menurun karena adanya perbaikan distribusi pendapatan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Diperjelas dengan penelitian yang dilakukan Kuznet menggunakan koefisien gini dan Pendapatan Nasional Bruto dengan menggunakan *Inverted U-Curve* menunjukkan bahwa pada awal pembangunan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan mempunyai hubungan yang searah sehingga kurva bergerak naik (Gambar 2.2). Setelah mengalami peningkatan yang berlebih hingga titik puncak (*turning point*) pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbanding terbalik sehingga kurva bergerak mengalami penurunan. Ini yang mendasari penelitian Kuznet dengan kurva huruf U terbalik. Menurut Kuznet ada empat faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan permintaan konsumen disertai peningkatan pendapatan, peningkatan sumberdaya manusia dan fisik, peningkatan kapasitas teknologi oleh inovasi serta keterbukaan perdagangan internasional dan aliran modal.



Sumber: Todaro (2003: 220)

Gambar 2.2 Kuznet Curve

Beberapa peneliti juga menjelaskan dalam hasil penelitiannya seperti Barro (1999) menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara miskin, namun di negara maju justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dilakukan oleh Stephen Knowles (2001) di negara Swedia ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus pada awal tetapi setelah melewati titik puncak pembangunan, maka ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi akan berbanding terbalik.

2.5.6 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM). Mengingat pentingnya pendidikan memiliki peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menitikberatkan peningkatan mutu pendidikan baik dari sumberdaya manusia maupun dari sarana penunjang pendidikan. Secara konseptual, pembentukan manusia adalah “suatu

proses untuk memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara”, sehingga pembentukan modal manusia karenanya selalu dikaitkan dengan investasi dengan manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif” (Jhingan, 1999: 414).

Kualitas sumberdaya manusia yang baik mampu memunculkan tenaga kerja yang lebih produktif dan mumpuni. Pendidikan juga memberikan kontribusi pada produksi melalui *spillover effect* (efek berantai) dan proses pengorganisasian kerja; pendidikan menjadi stimulasi bagi pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas melalui penelitian dan pengembangan; pendidikan meningkatkan efektivitas alokasi tenaga kerja dan kebutuhan permintaan lapangan kerja; dan pendidikan menciptakan isyarat simpul tingkat sosial ekonomi yang meningkatkan ekonomi itu sendiri.

Pembangunan suatu masyarakat dapat digambarkan sebagai salah satu indikator sosial yang dapat dilihat dari tingkat kepandaian membaca dan menulis masyarakat. Menurut penjelasan Badan Pusat Statistik (2016) untuk mengukur tingkat pendidikan ada dua ukuran. *Pertama*; Rata-rata lama sekolah, dimana menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. *Kedua*; Angka Melek Huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

2.5.6.1 Hubungan pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi baru (*New growth theory*) atau yang dikenal sebagai teori endogen merupakan pendekatan yang mengangkat pentingnya stok modal manusia. Stok modal manusia yang baik diasumsikan dapat meningkatkan output. Diperjelas oleh Todaro (2004: 165-172) bahwa dalam jangka panjang, output akan meningkat hanya jika modal manusia juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya investasi modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dari sumberdaya manusianya. Dengan meningkatnya produktivitas maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan.

Pentingnya peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh Pshacaropoulus dalam Ghozali (2005: 1) menyatakan bahwa dalam teori *human capital*, pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang menanamkan ilmu pengetahuan, ketrampilan atau keahlian, nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berguna bagi manusia, sehingga kapasitas belajar dan kapasitas produktif manusia akan mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya kapasitas belajar dan kapasitas produktif dapat meningkatkan produktivitas dari seseorang sehingga pendapatan seseorang akan meningkat diiringi dengan meningkatnya *output* berupa barang dan jasa bagi masyarakat. Pendapatan yang meningkat yang diiringi peningkatan output berarti menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kim,1986, dalam Ghozali, 2005:1).

Hasil empiris penelitian yang dilakukan oleh O'Callaghan (2002) dengan menggunakan model Cobb-Douglass dengan menambahkan variabel modal

manusia dengan indikator modal manusia yang digunakan didasarkan pada angka melek huruf sebagai *output* dari pendidikan dan angka rasio partisipasi sekolah tingkat SMP sebagai *input*. Hasil penelitian menunjukkan investasi pada bidang pendidikan dapat meningkatkan akumulasi stok modal manusia. Pada tingkat makro, teknologi dan modal manusia merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak ditemukan, akan tetapi sebagaimana hasil dari penelitian menunjukkan banyak perbedaan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa desentralisasi fiskal ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara di sisi lain, tidak sedikit juga yang berpendapat sebaliknya desentralisasi fiskal justru berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

1. Penelitian dilakukan oleh Akai et.al (2007) di 50 negara bagian Amerika periode 1992-1998. Ukuran untuk variabel desentralisasi fiskal yaitu rasio pengeluaran pemerintah daerah (lokal) terhadap pengeluaran daerah (lokal dan pusat) dan rasio penerimaan pemerintah daerah (lokal) dengan penerimaan pemerintah daerah (lokal dan pusat). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat *humpshaped*. Pada saat derajat desentralisasi fiskal masih rendah, maka peningkatan desentralisasi fiskal akan memberikan pengaruh positif dan signifikan, baik pada indikator penerimaan maupun indikator pengeluaran.

Namun ketika desentralisasi fiskal sudah optimal, peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif.

2. Thiessen (2003) dengan observasinya dilakukan di negara-negara OECD tahun 1973-1998 dengan menggunakan alat analisis *Ordinary Least Square* (OLS). Desentralisasi diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (tanpa transfer) terhadap total pendapatan. Hasil dari penelitian ini yaitu Pola hubungan desentralisasi fiskal seperti sebuah lonceng (*bell shaped*), yaitu pada saat derajat desentralisasi masih rendah terdapat hubungan positif dan signifikan, sedangkan pada tingkat desentralisasi yang terlalu tinggi, maka hubungannya menjadi negatif dan signifikan.
3. Zulyanto (2010) penelitian dilakukan di provinsi Bengkulu dengan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Analisis desentralisasi fiskal diukur dengan rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah pusat. Hasil studinya menunjukkan adanya hubungan bentuk *hump-shaped (a hump-shaped relation)* dalam pengaruh desentralisasi fiskal di provinsi Bengkulu. Artinya pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampaui tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada derajat desentralisasi fiskal terlampaui tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
4. Penelitian dilakukan oleh Tao Zhang dan Heng-fu Zou dalam jurnalnya "Fiscal decentralization, Public spending, and Economic growth in China" dengan menggunakan data panel 28 provinsi di China pada periode 1980-

1992. Hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang negatif signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Penelitian dilakukan oleh Jing Jin dan Heng-fu Zou dalam jurnalnya “Fiscal Decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China” dengan menggunakan data panel 30 provinsi di China periode 1979-1993 dan 1994-1999. Hasil dari penelitiannya menunjukkan Pertumbuhan ekonomi secara negatif dipengaruhi oleh pengeluaran daerah, tetapi berhubungan positif pada penerimaan. 1994-1999; Pertumbuhan ekonomi tidak berhubungan dengan pengeluaran pmda, tapi berhubungan secara negative terhadap pengeluaran. Kesimpulan; Argumentasi yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat menyebabkan efisiensi dan akan mendorong pertumbuhan, ternyata tidak terbukti di China.

2.7 Hipotesis dan Model Analisis

2.7.1 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan penelitian terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2004-2013.
2. Variabel derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2004-2013.

2.7.2 Model Analisis

Model analisis dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 DF^2_{it} + \beta_3 INV_P_{it} + \beta_4 GINI_{it} + \beta_5 GINI^2_{it} + \beta_6 EDUC_{it} + \mu_{it} \dots (2.7)$$

Dimana:

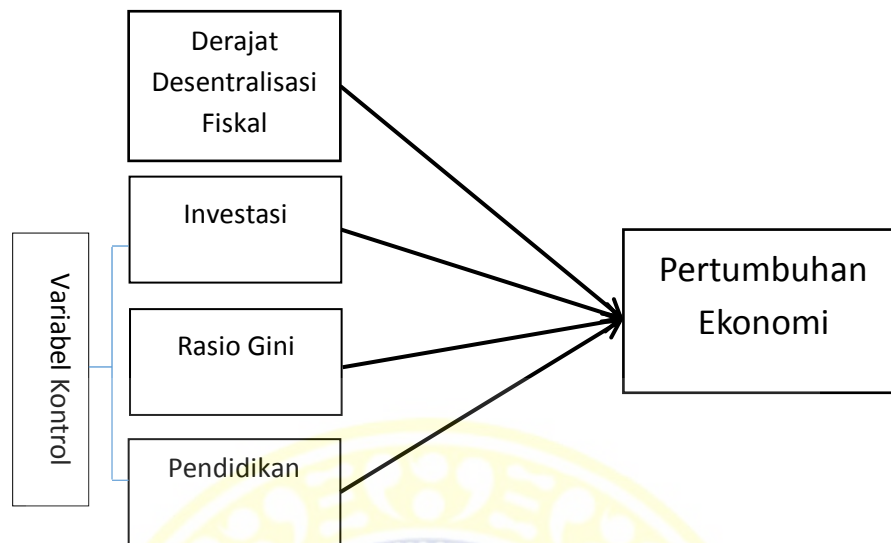
| | |
|---------------|--|
| PE_{it} | = Pertumbuhan Ekonomi (persen) |
| DF_{it} | = Derajat Desentralisasi Fiskal (persen) |
| DF^2_{it} | = Derajat Desentralisasi Fiskal Kuadrat (persen) |
| INV_{it} | = Investasi Pemerintah (Milyar) |
| $GINI_{it}$ | = Rasio Gini/Indeks Gini |
| $GINI^2_{it}$ | = Rasio Gini Kuadrat |
| $EDUC_{it}$ | = Pendidikan (dilihat dari angka melek huruf dalam persen) |

2.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam penelitian ini akan memasukkan tiga variabel utama yang dijadikan sebagai variabel kontrol diantaranya:

1. Investasi
2. Rasio Gini/Indeks Gini
3. Pendidikan

Secara sistematis hubungan antara derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam gambar 2.3 menjelaskan bahwa tujuan utama penelitian ini melihat pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur sekaligus melihat hubungan *hump-shaped* di kabupaten/kota. Untuk melihat *Hump-shaped relation* dilakukan dengan mengkuadratkan derajat desentralisasi fiskal dengan harapan nilai derajat desentralisasi fiskal kuadrat memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi.

Faktor pengaruh yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota tentunya tidak hanya derajat desentralisasi fiskal saja, sehingga dalam penelitian ini memasukkan variabel ekonomi lainnya yang memiliki pengaruh besar pula terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu Investasi, Rasio Gini, dan Pendidikan dengan indikator yang digunakan adalah angka melek huruf.

BAB 3**METODE PENELITIAN****3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif inferensial dengan uji hipotesis dengan alat analisis regresi. Tujuan dilakukannya analisis regresi ini untuk melihat pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat serta variabel kontrol (Investasi, rasio Gini, dan pendidikan) secara bersama-sama dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain melihat pengaruh antar variabel, dalam penelitian ini juga melihat hubungan *hump-shaped*. Hubungan *hump-shaped* terjadi jika derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan derajat desentralisasi fiskal kuadrat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan memasukkan beberapa variabel kontrol seperti Investasi, Rasio Gini, dan Pendidikan dengan indikator yang digunakan adalah angka melek huruf. Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan/dibuat konstan sehingga variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol umum digunakan pada penelitian yang sifatnya perbandingan/komperatif. Dengan memasukkan variabel kontrol ini dimaksudkan agar pengaruh derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat pengaruhnya secara bersama-sama dengan

variabel lain dalam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.

3.7 Identifikasi Variabel

Berdasarkan model analisis, maka dalam penelitian ini menggunakan enam variabel yang dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan pertumbuhan ekonomi (PE) 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004-2013.
2. Variabel bebas (*independent variable*) terdiri dari derajat desentralisasi fiskal (DF) dan derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF²) 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004-2013.
3. Variabel kontrol (*control variable*) terdiri dari tiga variabel yaitu Investasi (INV), Rasio Gini (GINI), Rasio Gini kuadrat (GINI²) dan Pendidikan (EDUC) dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004-2013.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini ,masing-masing variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi, merupakan rasio PDRB tahun t dikurangi PDRB tahun sebelumnya dengan PDRB tahun sebelumnya. PDRB yang digunakan yaitu PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang dinyatakan dalam satuan persen.
2. Derajat Desentralisasi Fiskal, yang dihitung menggunakan indikator pengeluaran dalam penelitian ini, variabel derajat desentralisasi fiskal

diproksi dengan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi total belanja daerah dalam satuan persen.

$$\text{Derajat desentralisasi fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Total}} \times 100$$

3. Derajat desentralisasi fiskal kuadrat merupakan hasil kuadrat dari penghitungan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat hubungan *hump-shaped* di kabupaten/kota sebagaimana studi yang dilakukan oleh Thiessen (2003), Akai (2007), dan Zulyanto (2010).
4. Investasi pemerintah, variabel investasi pemerintah di tunjukkan dengan realisasi belanja modal pemerintah daerah dalam realisasi anggaran belanja pemerintah kabupaten/kota. Dengan satuan Miliyar Rupiah.
5. Rasio Gini/Indeks Gini yang merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota diperoleh dari badan pusat statistik provinsi Jawa Timur.
6. Rasio Gini Kuadrat merupakan hasil kuadrat dari Rasio Gini yang merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.
7. Pendidikan, indikator pendidikan dilihat dari nilai angka melek huruf dalam bentuk persentase dari badan pusat statistik provinsi Jawa Timur

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data panel dari 38 kabupaten/kota provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Dimana kabupaten tersebut meliputi kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember,

Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sedangkan sembilan kota provinsi Jawa Timur meliputi kota Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Batu dalam periode waktu 10 tahun setelah diterapkannya otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia tahun 2004 hingga tahun 2013.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Data ICOR provinsi Jawa Timur, Indeks Gini, dan Angka Melek Huruf (AMH). Data yang terkumpul bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi nasional maupun internasional untuk mendukung penelitian.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari perpustakaan dan website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Timur.

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Metode Regresi Data Panel

Model regresi menggunakan data panel adalah model regresi yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Penggabungan data *time*

series dan *cross section* membuat jumlah observasi bertambah secara signifikan tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data sehingga menghasilkan derajat kebebasan atau *degree of freedom* yang lebih besar. Selain itu data panel dapat menjelaskan dua informasi, yaitu informasi perbedaan antar individu dan informasi perubahan antar periode waktu. Pada umumnya model regresi data panel data dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

- Y_{it} : nilai variabel terikat (*dependent variabel*) pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t.
- X_{it} : nilai variabel bebas (*independent variabel*) pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t.
- α : parameter *intercept* atau titik potong sumbu tegak Y.
- β : koefisien kemiringan (*slope*)
- ε_{it} : komponen *error* pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t.

Selain keunggulan diatas menurut Gujarati (2012:592) terdapat beberapa keuntungan apabila kita menggunakan regresi data panel. Keuntungan tersebut antara lain yaitu:

1. Teknik estimasi data panel dapat mengontrol heterogenitas secara eksplisit dengan memberikan variabel spesifik subjek.
2. Dengan menggabungkan antara observasi time series dan cross section, data panel memberi banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolinieritas antar variabel, lebih banyak *degree of freedom*, dan lebih efisien.

3. Data panel paling cocok digunakan untuk *study of dynamic adjustment* karena data panel berdasarkan pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*).
4. Data panel paling baik digunakan untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara sederhana yang tidak bisa dilihat pada data *cross section* murni atau *time series* murni.
5. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit. Misalnya fenomena *Economic of scale* dan perubahan teknologi lebih tepat menggunakan data panel apabila dibandingkan dengan menggunakan data *cross section* dan *time series*.
6. Dengan membuat data menjadi berjumlah beberapa ribu unit, data panel dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita meregresi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi besar.

Terdapat tiga metode yang bisa digunakan untuk mengolah data panel. Pertama adalah pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

3.6.1.1 Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan PLS merupakan pendekatan dalam regresi data panel yang paling sederhana. Metode regresi PLS secara sederhana menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* tanpa memperhatikan dimensi individu dan waktu. Oleh karena itu pendekatan PLS menggunakan asumsi bahwa *intersept* dan *slope* dianggap konstan sehingga perilaku antar individu dianggap sama dalam berbagai rentang waktu. Estimasi model PLS menggunakan metode

ordinary least square atau OLS. Model data panel dengan menggunakan pendekatan *pooled least square* (PLS) adalah sebagai berikut (Gujarati, 2012:239):

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

dimana i adalah subyek ke- i dan t adalah periode waktu dari variabel. Kekurangan terbesar dari penggunaan model PLS adalah respon dari variabel bebas ke variabel terikat dianggap sama untuk semua *cross section* yang digunakan dalam regresi.

3.6.1.2 Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)

Pendekatan data panel yang kedua adalah pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM). Teknik pendekatan FEM merupakan teknik estimasi data panel yang menggunakan variabel *dummy* untuk mengetahui adanya perbedaan *intersept*. Pendekatan *fixed effect* menggunakan asumsi bahwa koefisien regresi (*slope*) konstan (tetap antar perusahaan dan antar waktu), namun intersepnya berbeda-beda. Metode ini memiliki kelemahan yaitu berkurangnya *degree of freedom* yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Menurut Gujarati (2012:243) model data panel dengan pendekatan *fixed effect* adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_1 + \alpha_2 D_2 + \dots + \alpha_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

3.6.1.3 Pendekatan *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan data panel yang ketiga adalah pendekatan *random effect model* (REM) atau dikenal juga dengan istilah *error correction model* (ECM). Pendekatan *random effect model* merupakan teknik estimasi yang memperhitungkan adanya variabel gangguan (*error*) yang saling berhubungan baik antar waktu maupun antar individu. *Random effect model* (REM) tidak dapat menggunakan teknik metode OLS karena tidak akan menghasilkan estimator yang

efisien, sehingga dalam pendekatan ini lebih tepat menggunakan Metode *Generalized Least Square* (GLS). Model data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM) adalah sebagai berikut (Gujarati, 2012: 250) :

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

3.6.5 Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Dari ketiga pendekatan yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dilakukan beberapa pengujian untuk memilih model terbaik yang harus digunakan dalam pengolahan data panel. Pertama untuk memilih antara model *pooled least square* (PLS) atau *fixed effect model* (FEM) menggunakan uji Chow atau uji F teretriksi (*restricted F test*).

Pada penentuan model yang akan digunakan untuk mengestimasi antara PLS dengan FEM dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2_{ur} - R^2_r / (m)}{(1 - R^2_{ur}) / (n - k)} \dots \dots \dots (3.5)$$

Keterangan :

R^2_r : R^2 model PLS

R^2_{ur} : R^2 model FEM

m : Jumlah restricted Variabel

n : Jumlah sampel

k : Jumlah variabel penjelas

Hipotesis yang digunakan dari *restricted F test* yaitu :

H_0 : Model *Pooled Least Square* (PLS)

H_1 : Model *Fixed Effect Model* (FEM)

Dari penggunaan persamaan diatas jika diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada tingkat α tertentu (1%, 5%, 10%), maka hipotesis nol ditolak. Kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut adaah penggunaan model *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik, begitu juga sebaliknya. Cara lainnya adalah dengan membandingkan nilai probabilitas F dengan tingkat α yang digunakan. Apabila nilai probabilitas F pada $FEM < \alpha$ (1%, 5%, 10%), maka H_0 ditolak, sehingga model yang dipilih model FEM.

Kedua, melakukan LM test (Langrarian Multiplier) yang bertujuan untuk memilih antara *Pooled least Square* (PLS) atau *Random Effect Model* (REM). Pengujian LM test dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Chi-square terhadap α (1%, 5%, atau 10%) dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : PLS

H_1 : REM

Apabila nilai probabilitas LM test kurang dari α (1%, 5%, 10%) maka H_0 ditolak sehingga model yang digunakan adalah random effect model (REM). Hasil dari uji LM test tersebut harus dibandingkan dengan uji hausman.

Apabila model yang terbaik dari restricted F test adalah FEM maka perlu dilakukan uji Hausman. Uji ini dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Hipotesis yang digunakan dalam uji Hausman adalah

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika nilai chi square hitung > chi square tabel dan p-value signifikan, maka H_0 ditolak dan *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik dalam regresi data panel yang sedang diuji.

3.6.6 Pengujian Statistik

3.6.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 yaitu untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Nilai koefisien dari R^2 antara nol dan satu. Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi regresi akibat perubahan variasi regresi. Jumlah kuadrat variasi total atau *total sum of squares (TSS)* terdiri dari jumlah kuadrat variasi ter jelaskan atau *explained sum of squares (ESS)* dan jumlah kuadrat variasi yang tak ter jelaskan atau *residual sum of square (RSS)*

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum y_i^2} \dots \dots \dots (3.6)$$

Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya juga kecil. Nilai determinasi R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen yang tercantum dalam model mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap variabel dependennya.

$$\text{Jadi: } 0 \leq R^2 \leq 1$$

Jika R^2 bernilai satu, maka variabel dependen dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel independen. Dan sebaliknya jika R^2 bernilai nol, maka variabel dependen tidak dapat dijelaskan secara sempurna oleh variabel independen dalam model. Semakin besar nilai R^2 (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. semakin mendekati Nol maka variabel independen secara keseluruhan

tidak dapat menjelaskan variabilitas dari variabel dependen (Sumodiningrat, 1999).

3.6.6.2 Uji t-statistik

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual (parsial) mempengaruhi variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Untuk melihat hasil pengujian dalam uji t harus membandingkan antara nilai t statistik dengan nilai pada t tabel. Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut;

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang artinya salah satu variabel bebas (*independent*) tidak mempengaruhi variabel terikat (*dependent*) secara signifikan.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya salah satu variabel bebas (*independent*) mempengaruhi variabel terikat (*dependent*) secara signifikan.

3.6.6.3 Uji F-statistik

Uji F statistik dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya secara keseluruhan (*simultan*). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Rumus untuk menghitung F hitung menurut Gujarati (2012):

$$F = \left(\frac{R^2}{k-1}\right) / \left(\frac{1-R^2}{N-1}\right) \dots \dots \dots (3.7)$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = Jumlah observasi

Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_n$

H_1 : Paling tidak salah satu β tidak sama dengan nol

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut;

1. Jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila, yang artinya variabel independent secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.
2. Jika F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya variabel independent secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.

3.6.7 Pengujian Asumsi Klasik

3.6.7.1 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi karena adanya perbedaan varian antar seri data. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians dari error bersifat tetap atau konstan. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka koefisien estimasi akan menjadi bias dan tidak konsisten (Gujarati, 2012:463). Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas digunakan *Modified Wald test* dalam stata. Hipotesis yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah:

H_0 : Tidak ada heteroskedastitas (homoskedastisitas)

H_1 : Ada heteroskedastisitas

Apabila nilai probabilitas $> 5\%$ berarti H_0 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam hasil regresi. Namun jika nilai probabilitas $< \alpha=5\%$ maka H_0 ditolak yang berarti terjadi masalah heteroskedastisitas dalam hasil regresi.

3.6.7.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya hubungan antara anggota observasi satu dengan anggota observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode regresi data panel, autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lainnya. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan cara menggunakan *Wooldridge test*. Hipotesis yang digunakan untuk uji autokorelasi yaitu:

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_1 : ada autokorelasi

Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang menandakan tidak terjadi masalah autokorelasi dalam hasil regresi. Sedangkan jika nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, H_1 diterima yang menandakan terjadi masalah autokorelasi. Adanya korelasi serial pada error menyebabkan model menjadi tidak konsisten untuk jumlah sampel yang besar karena error tersebut terbaca menjadi lebih besar.

3.6.7.3 Uji Multikolinearitas

Istilah Multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variable-variabel bebas dalam model regresi. Bila variablevariabel bebas berkorelasi sempurna disebut multikolinearitas sempurna (*perfect multicollinearity*). Beberapa hal penting terkait dengan multikolinearitas adalah (Sumodiningrat, 1999);

1. Multikolinearitas pada hakekatnya adalah fenomena sample. Sampel tidak memenuhi asumsi dasar mengenai ketidaktergantungan diantara variable-variabel bebas yang termasuk dalam model.
2. Multikolinearitas adalah persoalan derajat (*degree*) dan bukan persoalan jenis. Multikolinearitas bukanlah persoalan mengenai apakah korelasi di antara variable-variabel bebas itu negatif atau positif; tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi di antara variable-variabel bebas.
3. Multikolinearitas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan adanya hubungan linear di antara variable-variabel bebas. Artinya masalah ini tidak akan terjadi pada hubungan nir-linear di antara variable-variabel bebas. Jika terdapat multikolinearitas sempurna dalam model, maka penaksirpenaksir OLS tidak bisa ditentukan (*indeterminate*), Varian dan kovarian dari penaksir menjadi tak terhingga besarnya (*infinitely large*). Adapun cara untuk mendeteksi Multikolinearitas dapat dilakukan dengan ; *Pertama*, Uji Frisch's Confluence Analysis atau Bunch-Map Analysis. Gejala yang biasanya dipakai untuk menandai adanya multikolinearitas adalah (a) Koefisien Determinasi (R^2), (b) Korelasi Parsial, dan (c) Kesalahan baku dari parameter-parameter

regresi. *Kedua*, Uji Farrar-Glauber. Menggunakan tiga statistik untuk menguji adanya Multikolinearitas, yaitu (a) Chi-Kuadrat atau *Chi-Squares*, (b) *Ratio F*, dan (c) *Ratio-t*. Selain itu uji multikolinearitas dapat juga dilakukan dengan regresi antar variabel penjelas, dengan tujuan untuk mendeteksi apakah model tersebut mengandung multikolinearitas atau tidak. Jika R^2 dari setiap regresi parsial antara variabel penjelas lebih kecil dari pada R^2 regresi keseluruhan, maka dapat disimpulkan model observasi tidak mengandung multikolinearitas (Gujarati, 2012).

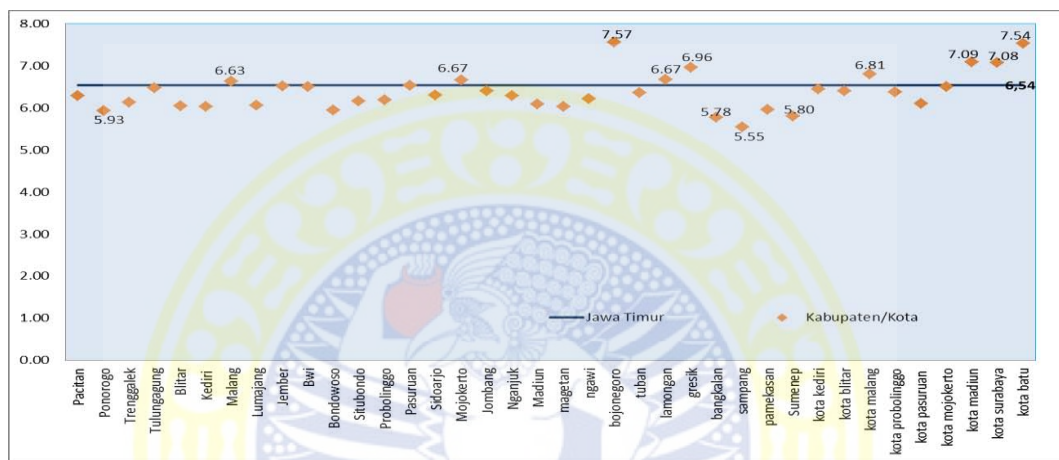


BAB 4**HASIL DAN PEMBAHASAN****4.6 Gambaran Umum Penelitian****4.6.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi proses peningkatan output dari waktu ke waktu sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari rasio perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dengan PDRB tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah akan memberikan kontribusi yang kecil pula pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah sangat ditentukan oleh pemerintah daerah dalam pengalokasian sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta faktor eksternal yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional dan internasional baik dari kebijakan sektor riil maupun sektor moneter.

Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2009 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 5,01 persen dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu 1,67 persen pada tahun 2010. Peningkatan terus terjadi hingga tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 7,27 persen. Berbeda dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur justru mengalami penurunan sebesar 0,72 persen. Peningkatan dan

penurunan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tentu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Di tingkat kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi juga mengalami berbagai fluktuasi di masing-masing daerah. Berikut rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur selama kurun waktu 2009 hingga 2013.



Sumber: Badan Pusat Statisti Jawa Timur 2015

Gambar 4.1 **Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur** **Tahun 2009-2013**

Pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2013 adalah 6,54 persen. Pada tingkat kabupaten/kota, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang tertinggi yaitu Kabupaten Bojonegoro dengan rata-rata pertumbuhannya 7,57 persen. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu 2009 hingga 2013 karena pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro meningkat tajam dari 6,55 persen pada tahun 2009 menjadi 10,97 persen pada tahun 2010. Setelah tahun 2010 pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bojonegoro justru mengalami penurunan hingga 2013 mencapai 5,30 persen.

Berbeda dengan daerah lain dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi di bawah Kabupaten Bojonegoro pada kurun waktu yang sama diantaranya Kota Batu 7,54 persen, Kota Madiun 7,09 persen, dan Kota Surabaya 7,08 persen. Kota Batu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen pada tahun 2009 meningkat hingga 8,26 persen pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Batu sedikit mengalami penurunan 0,06 persen yaitu 8,20 persen. Hasil pertumbuhan Kota Batu tidak jauh beda dengan Kota Surabaya dimana tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17 persen dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2012 mencapai 7,76 persen, hal sama terjadi yaitu pada tahun 2013, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya turun mencapai 7,34 persen. Berbeda dengan Kota Madiun, selama kurun waktu yang sama pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mulai tahun 2009 hingga 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar 5,22 persen, 6,97 persen pada tahun 2010, 7,29 persen pada tahun 2011, 7,88 persen pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonominya mencapai 8,07 persen.

Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu yang sama dengan persentase paling rendah lebih terarah pada kawasan di pulau Madura. Kabupaten Sampang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang paling rendah yaitu 5,54 persen, diikuti Kabupaten Bangkalan 5,77 persen, Kabupaten Sumenep 5,80 persen, dan Kabupaten Pamekasan 5,95 persen.

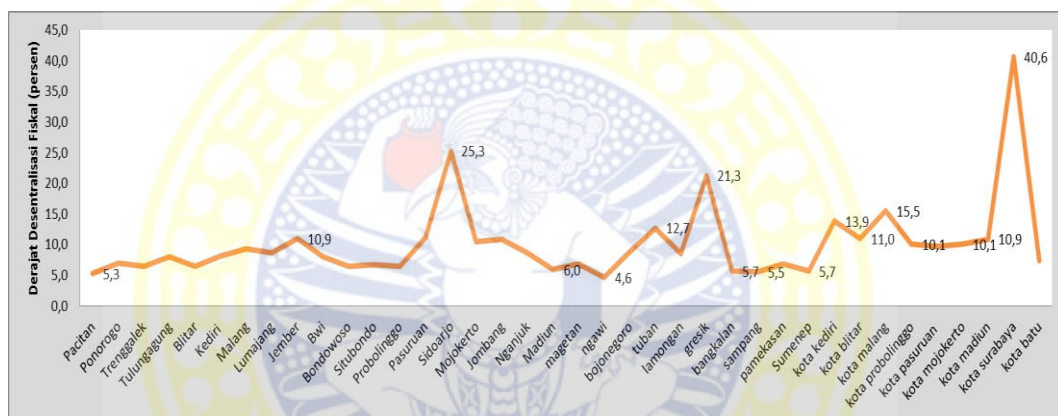
Kabupaten Sampang pada tahun 2009 pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 4,27 dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2012 mencapai 6,19 persen, tetapi hal yang sama terjadi pada tahun 2013 dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Begitu juga terjadi di Kabupaten Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan dari tahun 2009 hingga 2012 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2013 juga mengalami penurunan. Sedangkan kabupaten/kota yang lain rata-rata pertumbuhan ekonominya antara 5,96 persen hingga 6,97 persen.

Secara umum penurunan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota pada tahun 2013 menurut Sairi Hasbullah kepala Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur karena adanya penurunan output dari produktivitas sektor pertanian di Jawa Timur yang hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 0,07 persen. Tiga *leading sector* penggerak utama perekonomian di Jawa Timur lebih tertuju pada sektor perdagangan yang mencakup hotel dan restaurant, industri, dan jasa. Sedangkan sektor yang lain selain perdagangan, industri, dan jasa melemah pada tahun 2013 tersebut.

4.6.2 Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasari oleh Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan suatu daerah melaksanakan kebijakan desentralisasi adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kesenjangan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik,

meningkatkan efisiensi sumberdaya nasional, transparansi alokasi dana transfer, dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro (Mardiasmo, 2009). Penghitungan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mustafa dan Halim (2008) yaitu rasio dari pendapatan asli daerah dan total pendapatan daerah. Berikut dijelaskan dalam Gambar 4.2 tingkat derajat desentralisasi fiskal di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur.



Sumber: Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur (diolah)

Gambar 4.2
Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2009-2013

Setelah dilakukannya penghitungan derajat desentralisasi fiskal dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (TPD) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di Kota Surabaya tertinggi di bandingkan kabupaten/kota yang lain yaitu sebesar 40,6 persen. Menurut penghitungan, derajat desentralisasi fiskal di Kota Surabaya setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 derajat desentralisasi fiskal di Kota Surabaya sebesar 30,26 persen dengan PAD sebesar 809.832.359 ribu rupiah dan TPD sebesar 2.675.379.995 ribu rupiah. Peningkatan terus terjadi setiap tahunnya

hingga tahun 2013 derajat desentralisasi fiskal di Kota Surabaya sebesar 53,32 persen dengan PAD sebesar 2.791.580.051 ribu rupiah dan TPD 5.235.293.716 ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi, dimana 53,32 persen total pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah.

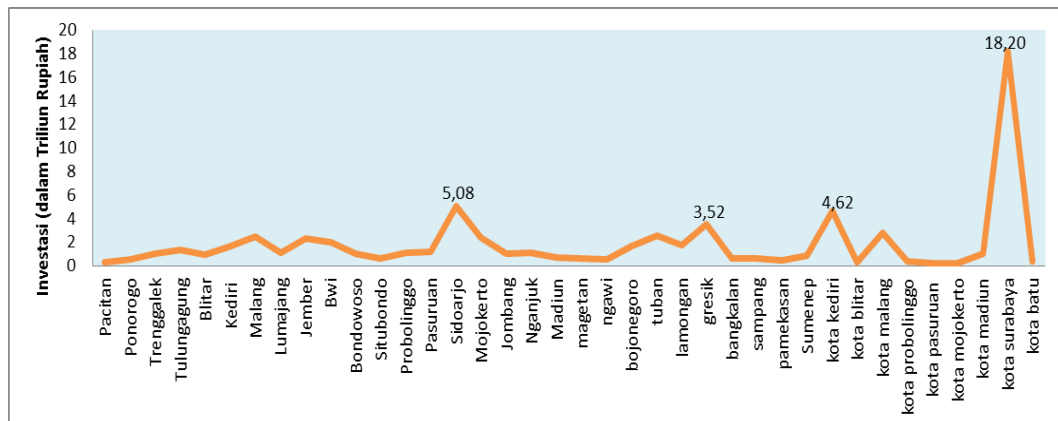
Kabupaten/kota dengan rata-rata derajat desentralisasi terendah dalam kurun waktu yang sama menurut penghitungan yang dilakukan adalah 4,6 persen yaitu Kabupaten Ngawi. Seperti halnya dengan Kota Surabaya, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Ngawi setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 derajat desentralisasi fiskal sebesar 3,2 persen hingga tahun 2013 mencapai 6,15 persen. Hal ini menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal di Kabupaten Ngawi masih rendah mengingat hanya sebesar 6,15 persen persentase PAD terhadap total penerimaan daerah (TPD) pada tahun 2013. Rendahnya PAD Kabupaten Ngawi ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah sebagian besar dari pemerintah pusat baik berupa dana bagi hasil maupun dana alokasi.

4.6.3 Investasi

Investasi merupakan salah satu variabel makro yang memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Semakin banyak investasi yang direalisasikan didalam suatu daerah menjadi gambaran pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Keadaan iklim investasi di Jawa Timur beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan yang baik. Data Badan Penanaman Modal provinsi Jawa Timur dari tahun 2013 realisasi investasi PMA dan PMDN mengalami peningkatan sebesar 8,7 persen dari tahun 2012. Peningkatan realisasi investasi ini memberikan kontribusi yang besar terhadap investasi nasional yaitu sebesar 68,5 triliun rupiah atau 17,2 persen terhadap investasi nasional.

Tingginya kontribusi investasi Jawa Timur terhadap investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak lepas dari dorongan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan daerah untuk menarik para investor masuk. Letak geografis dari kabupaten/kota juga mempengaruhi iklim investasi di dalamnya. Lokasi penanaman modal pada tahun 2013 menurut data dari Badan Penanaman Modal (BPM) provinsi Jawa Timur yang tertinggi adalah Kabupaten Gresik, diikuti oleh Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Dari penghitungan investasi di wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan incremental capital output ratio (ICOR), Kota Surabaya merupakan daerah dengan rata-rata nilai investasi tertinggi yaitu 18,20 triliun rupiah pada kurun waktu tahun 2009-2013. Tingginya investasi di Kota Surabaya karena didorong oleh unit-unit usaha yang ada di Surabaya. Menurut BPM provinsi Jawa Timur, Pada tahun 2013 tercatat Kota Surabaya memiliki 10.150 unit usaha yang berkembang. Berikut data investasi proxy dari penghitungan dengan ICOR pada tahun 2013.



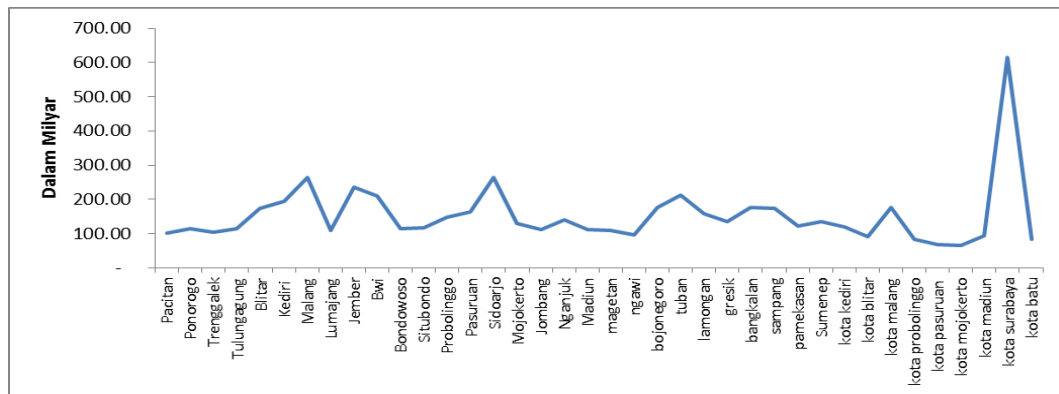
Sumber: Data diolah dengan proxy ICOR

Gambar 4.3

Rata-Rata Investasi Total Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata investasi tahun 2009 hingga 2013 tertinggi adalah Kota Surabaya. Investasi Kota Surabaya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Dengan proxy penghitungan diperoleh bahwa investasi Kota Surabaya pada tahun 2009 mencapai 14,31 triliun rupiah dengan ICOR Kota Surabaya sebesar 3,58, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 mencapai 22,85 triliun rupiah dengan ICOR sebesar 3,06. Rata-rata nilai investasi tertinggi kedua yaitu Kabupaten Sidoarjo 5,08 triliun rupiah, diikuti oleh Kota Kediri, dan Kabupaten Gresik. Sedangkan kabupaten/kota yang lain nilai investasinya pada tahun 2013 kurang dari 4 triliun rupiah.

Investasi total dibentuk berdasarkan hasil dari penjumlahan investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi Pemerintah dapat dilihat melalui belanja modal pemerintah daerah dalam belanja langsung pemerintah daerah. Berikut data rata-rata belanja modal pemerintah kabupaten/kota dari badan pusat statistik (BPS) Jawa Timur.



Sumber : Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/kota, BPS

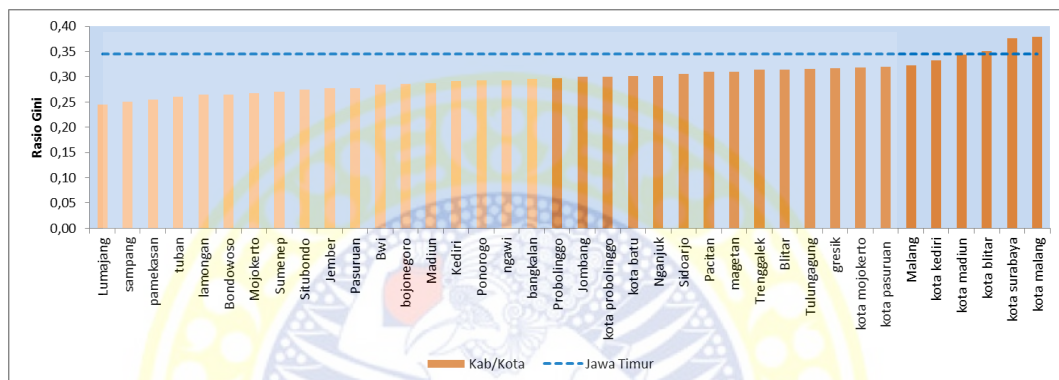
Gambar 4.4
Rata-Rata Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Rata-rata belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan Kota Surabaya dengan pengeluaran belanja modal terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Rata-rata belanja modal pemerintah Kota Surabaya sebesar 0,75 triliun rupiah. Kabupaten/kota dengan rata-rata belanja modal pemerintah di bawah 0,1 triliun rupiah dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto.

4.6.4 Ketimpangan Pendapatan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum bisa dikatakan berhasil jika distribusi pendapatan yang diterima masyarakat masih timpang atau belum merata. Ukuran yang tepat untuk melihat tingkat ketimpangan (disparitas) distribusi pendapatan salah satu dengan melihat rasio gini. Semakin kecil nilai rasio gini menunjukkan semakin merata distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai rasio gini menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut mengalami disparitas distribusi pendapatan.

Rata-rata rasio Gini provinsi Jawa Timur tahun 2009 hingga 2013 sebesar 0,35. Menurut kriteria Oshima, maka rata-rata rasio Gini di Jawa Timur dapat dikatakan dalam taraf ketimpangan sedang yaitu kisaran 0,3 hingga 0,5. Berikut data rata-rata rasio Gini seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur 2016 diolah

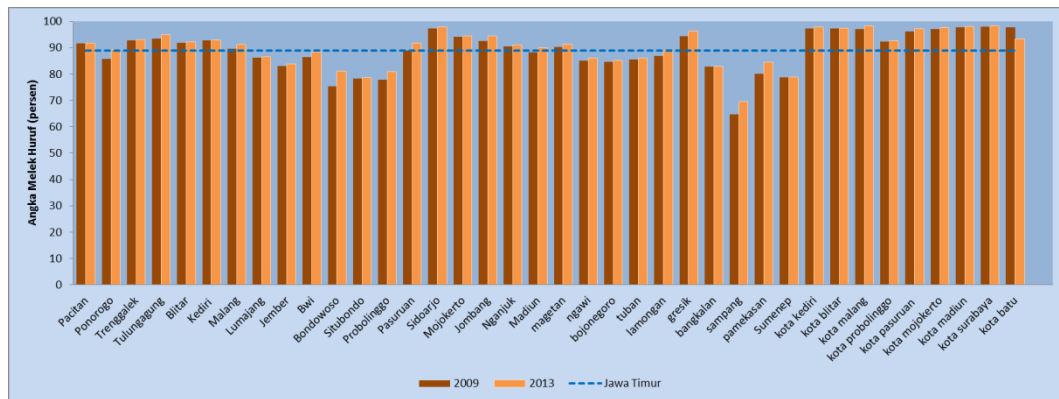
Gambar 4.5 **Rata-Rata Rasio Gini Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009-2013**

Dari Gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa rata-rata rasio Gini di tingkat kabupaten/kota tahun 2009 hingga 2013 hampir keseluruhan di bawah rata-rata rasio gini di tingkat provinsi kecuali Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Surabaya. Pada Gambar 4.5 nilai rata-rata rasio Gini yang dapat dikatakan pada taraf ketimpangan yang masih rendah adalah kabupaten/kota dengan angka rasio gini kurang dari 0,3 yang meliputi Kabupaten Lumajang, Sampang, Pamekasan, Tuban, Lamongan, Bondowoso, Mojokerto, Sumenep, Situbondo, Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Ponorogo, Ngawi, dan Bangkalan. Sedangkan kabupaten/kota yang lain dengan rata-rata rasio Gini antara 0,30 hingga 0,38 dapat dikatakan memiliki ketimpangan yang sedang.

Dari data badan pusat statistik provinsi Jawa Timur indeks Gini kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 rata-rata mengalami peningkatan. Kota Madiun dan Kota Blitar merupakan kabupaten/kota dengan indeks gini dari tahun 2009 hingga 2013 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 indeks Gini Kota Madiun sebesar 0,30 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013 mencapai 0,43. Hal serupa terjadi pada Kota Blitar, dimana pada tahun 2009 indeks Gini menunjukkan angka 0,32 dan pada akhir 2013 mencapai 0,40. Tentu ini menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak hanya meningkatkan output daerah tetapi pemerataan distribusi pendapatan di tingkat kabupaten/kota juga lebih diperbaiki.

4.6.5 Tingkat Pendidikan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tidak hanya didorong melalui modal fisik, melainkan modal manusia juga harus diperhatikan. Peningkatan produktivitas modal manusia salah satunya melalui perbaikan tingkat pendidikan. Semakin baik tingkat pendidikan maka semakin produktif sumberdaya manusia yang dimiliki. Indikator pendidikan dapat dilihat melalui tingkat lama menempuh pendidikan dan angka melek huruf, dimana kedua indikator tersebut merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan data yang ada rata-rata angka melek huruf seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 hingga 2013 di atas 75 persen. Lebih jelasnya, berikut data angka melek huruf seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2009 dan 2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Timur 2016

Gambar 4.6 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 dan 2013

Pada Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa angka melek huruf kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan. Kabupaten kota dengan angka melek huruf tertinggi adalah Kota Surabaya. Nilai angka melek huruf Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 98,00 persen dan mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2013 angka melek huruf Kota Surabaya mencapai 98,40 persen dengan rata-rata 98,18 persen selama tahun 2009 hingga 2013. Angka melek huruf tertinggi kedua yaitu Kota Madiun dengan rata-rata angka melek huruf sebesar 97,86 diikuti Kota Malang 97,67 persen, dan Kabupaten Sidoarjo 97,66 persen, sedangkan kabupaten/kota lain di bawahnya.

Rata-rata angka melek huruf di kabupaten/kota yang perlu menjadi perhatian adalah Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang menjadi salah satu kabupaten dengan rata-rata angka melek huruf paling rendah yaitu 64,81 persen. Pada tahun 2009 angka melek huruf Kabupaten Sampang hanya sebesar 64,81 persen, tetapi pertumbuhan angka melek huruf di Kabupaten Sampang hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. Diketahui bahwa pada tahun 2013

angka melek huruf Kabupaten Sampang mencapai 69,47 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir peningkatan mencapai 4,66 persen. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang paling besar dibandingkan kabupaten/kota yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan tingkat pendidikan masyarakatnya dan terus mendorongnya dengan harapan angka buta huruf semakin menurun.

4.7 Hasil Penelitian

Tujuan utama dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, serta variabel kontrol (Investasi, rasio Gini, dan Pendidikan) secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Selain itu, penelitian ini juga akan membuktikan hubungan *hump-shaped* di tingkat kabupaten/kota.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode regresi data panel untuk mengolah data penelitian. Penggunaan metode regresi data panel dikarenakan data yang diolah merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Dengan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai *cross section*, selama kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

4.8 Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis

4.8.1 Pemilihan Model Analisis Data Panel

Model regresi data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan estimasi dengan tiga metode yaitu *pooled least square* (PLS), *fixed effect models* (FEM), dan *random effect models* (REM). Pemilihan model yang terbaik dari ketiga

metode di atas dapat dilakukan dengan beberapa pengujian diantaranya adalah uji Chow untuk memilih model PLS atau FEM dan uji Hausman untuk memilih model antara FEM dan REM. Berikut hasil regresi dari model PLS, FEM, dan REM.

Tabel 4.1
Hasil Regresi *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Models* (FEM), dan *Random Effect Models* (REM)

| | | Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi (PE) | | |
|--|--------------|---|------------|------------|
| | | PLS | FEM | REM |
| Konstanta (_Cons) | Koefisien | 1.203172 | -12.99676 | -1.901819 |
| | t-stat | 2.73 | -5.88 | -1.54 |
| | Probabilitas | 0.007 | 0.000 | 0.123 |
| Derajat Desentralisasi Fiskal (DF) | Koefisien | 0.0686043 | 0.1045692 | 0.0659962 |
| | t-stat | 2.60 | 2.71 | 2.04 |
| | Probabilitas | 0.010 | 0.007 | 0.042 |
| Derajat Desentralisasi Fiskal² (DF2) | Koefisien | -0.0011611 | -0.0009397 | -0.0008381 |
| | t-stat | -2.03 | -1.43 | -1.35 |
| | Probabilitas | 0.043 | 0.154 | 0.178 |
| Investasi Pemerintah (INV_P) | Koefisien | 1.108798 | -0.5874509 | 0.6516741 |
| | t-stat | 2.03 | -1.05 | 1.27 |
| | Probabilitas | 0.043 | 0.295 | 0.204 |
| Rasio Gini (GINI) | Koefisien | 7.540191 | 6.454693 | 8.636499 |
| | t-stat | 2.95 | 2.87 | 3.90 |
| | Probabilitas | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
| Rasio Gini² (GINI2) | Koefisien | -6.160933 | -5.297244 | -7.335316 |
| | t-stat | -2.20 | -2.20 | -3.05 |
| | Probabilitas | 0.029 | 0.028 | 0.002 |
| Pendidikan (EDUC) | Koefisien | 0.0285498 | 0.1904725 | 0.0619165 |
| | t-stat | 3.33 | 7.34 | 4.28 |
| | Probabilitas | 0.001 | 0.000 | 0.000 |

Hasil regresi data panel dengan menggunakan metode *pooled least square* (PLS) pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal (DF), derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF2), Investasi pemerintah (INV_P), Rasio Gini (GINI), Rasio Gini kuadrat (GINI2) dan Pendidikan (EDUC) pada

tingkat signifikansi (α) 5% berpengaruh signifikan positif, serta variabel derajat desentralisasi fiskal kuadrat dan rasio Gini kuadrat memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang menunjukkan lebih kecil dari tingkat kesalahan 5%.

Begitu juga dengan hasil regresi menggunakan *fixed effect models* (FEM). Dengan tingkat kesalahan (α) 5% hasil menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal (DF), Rasio Gini (GINI), Pendidikan (EDUC) berpengaruh signifikan positif, serta variabel derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF2) memberikan tidak berpengaruh signifikan, dan Rasio Gini kuadrat (GINI2) memberikan pengaruh yang signifikan negatif, terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil berbeda ditunjukkan pada model *random effect models* (REM), dimana pada tingkat kesalahan yang sama variabel derajat desentralisasi fiskal kuadrat dan investasi pemerintah justru menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat kesalahan (α) 5%. Sedangkan variabel yang lain meliputi derajat desentralisasi, rasio gini, rasio gini kuadrat dan pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur tahun 2004 hingga 2013.

4.8.1.1 Uji Chow

Berdasarkan hasil pengujian data panel dengan tiga model diatas (PLS, FEM, dan REM) maka perlu dilakukan pengujian-pengujian lainnya untuk melihat model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui

model mana yang terbaik langkah awal yang dapat dilakukan yaitu membandingkan dari masing-masing ketiga model tersebut. Pertama, dilakukannya uji Chow untuk menentukan model terbaik antara model PLS dan FEM. Hipotesis dalam uji Chow yaitu sebagai berikut:

H_0 : *Pooled Least Square* (PLS)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil uji Chow dapat dilihat dari nilai probabilitas uji Chow dalam hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM). Jika nilai $prob>F$ kurang dari tingkat kesalahan atau $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang menunjukkan model terbaik dari PLS dan FEM adalah FEM, namun sebaliknya jika nilai $prob>F$ lebih besar dari tingkat kesalahan atau $\alpha = 5\%$ hal ini menunjukkan H_0 diterima dan H_1 ditolak yang mana model terbaik yang digunakan adalah model PLS. Berikut hasil dari uji Chow sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

| Nilai $Prob>F$ | Hipotesis | Kesimpulan |
|----------------|--|--|
| 0.0000 | H_0 : <i>Pooled Least Square</i> (PLS) ditolak H_1 : <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) diterima | Maka model yang dipilih dalam pengujian ini adalah <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) pada tingkat alfa 5%. |

Hasil uji Chow pada Tabel 4.2 menunjukkan pemilihan model antara model PLS dan FEM. Jika dilihat dari nilai probabilitas ($Prob>F$) 0,0000 pada tingkat kesalahan (α) 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulan dari

hipotesis tersebut adalah model terbaik antara PLS dan FEM berdasarkan hasil pengujian adalah FEM.

4.8.1.2 Uji Hausman

Setelah dilakukannya uji Chow untuk memilih model antara model PLS dan FEM dimana hasil menunjukkan FEM adalah model yang diterima, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengujian dengan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk melihat model yang tepat digunakan dalam penelitian antara FEM dan REM. Adapun hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Hasil uji Hausman dapat dilihat dari nilai probabilitas ($prob > chi^2$). Jika nilai $Prob > chi^2$ kurang dari tingkat kesalahan (α) 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini menunjukkan model FEM yang digunakan dalam penelitian. Begitu juga sebaliknya, jika nilai $Prob > chi^2$ lebih besar dari tingkat kesalahan (α) 5% maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah REM. Berikut hasil uji Hausman sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

| Nilai $Prob > chi^2$ | Hipotesis | Kesimpulan |
|----------------------|--|---|
| 0.0000 | H_0 : <i>Random Effect Model</i> (REM) ditolak H_1 : <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) diterima | Maka model yang dipilih dalam pengujian ini adalah <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) pada tingkat alpha 5%. |

Hasil uji Hausman yang ditunjukkan pada Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa pemilihan model yang digunakan antara FEM dan REM sesuai hasil dan hipotesis yang ada model terbaik adalah FEM. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas ($Prob > chi^2$) 0,0000 kurang dari tingkat kesalahan (α) 5%

4.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat hasil regresi yang dilakukan apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi OLS. Tujuan dari dilakukannya pengujian ini adalah untuk memastikan apakah model yang digunakan dalam penelitian telah bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

4.8.2.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen (Gujarati, 2003:342). Untuk melihat adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan uji *variance inflation factor* (VIF). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF dari hasil regresi yang diperoleh. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 atau tolerance ($1/VIF$) adalah 0.1 atau kurang maka dapat dikatakan bahwa hasil regresi tersebut mengandung multikolinieritas. Begitu juga sebaliknya jika nilai VIF kurang dari 10 maka hal tersebut menunjukkan bahwa hasil regresi yang telah diperoleh tidak mengandung multikolinieritas. Adapun hasil pengujian multikolinieritas dengan VIF sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil *Variance Inflation Factor* (VIF)

| Variabel | VIF | 1/VIF |
|-------------------|-------------|----------|
| DF ² | 9.57 | 0.104491 |
| DF | 9.97 | 0.100275 |
| INV_P | 1.71 | 0.584523 |
| EDUC | 1.41 | 0.740115 |
| GINI | 9.70 | 0.707189 |
| GINI ² | 9.29 | 0.107620 |
| Mean VIF | 6.94 | |

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai *mean* dari VIF adalah 6,94 dimana hasil ini lebih kecil dari 10, tetapi nilai *tolerance* masing-masing variabel keseluruhan variabel di atas 0,1. Pada variabel derajat desentralisasi fiskal (DF²) kuadrat, derajat desentralisasi (DF), Rasio Gini (GINI), Rasio Gini kuadrat (GINI²) nilai VIF maupun nilai *tolerance* mendekati angka multikolinieritas. Untuk masalah variabel DF dan DF², GINI dan GINI² asumsi multikolinieritas dapat dilonggarkan, karena pada umumnya multikolinieritas hanya terjadi pada hubungan yang bersifat linear dan tidak pada hubungan nonlinear (Sumodiningrat,1999). Sedangkan investasi pemerintah (INV_P) dan pendidikan (EDUC) tidak mengandung multikolinieritas.

4.8.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana nilai varians dari setiap gangguan atau *error* tidaklah konstan. Untuk mendeteksi adanya masalah

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa pengujian. Salah satunya adalah *Wald Test*. Hipotesis yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Homoskedastisitas

H_1 : Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan *Wald Test* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Wald Test

| Nilai <i>Prob > chi²</i> | Hipotesis | Kesimpulan |
|---|---|---|
| 0.0000 | H_0 : Homoskedastisitas ditolak H_1 : Heteroskedastisitas diterima | Pada tingkat alpha (α) 5% maka H_1 diterima, hal ini mengindikasikan bahwa model ini melanggar asumsi klasik heteroskedastisitas |

Berdasarkan nilai *prob > chi²* pada Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa dalam metode FEM ini model terindikasi melanggar asumsi klasik yaitu heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai *prob > chi²* (0,0000) lebih kecil dari nilai signifikansi (α) 5% dimana H_1 diterima.

4.8.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan pada periode t-1. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan

menggunakan *Wooldridge Test*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini yaitu sebagai berikut:

H_0 : tidak terdapat autokorelasi

H_1 : terdapat autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian dengan *Wooldridge test* dengan STATA 13 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Wooldridge Test

| Nilai <i>Prob>F</i> | Hipotesis | Kesimpulan |
|---------------------------|---|--|
| 0.0065 | H_0 : tidak terdapat Autokorelasi ditolak H_1 : terdapat Autokorelasi diterima | Pada tingkat alpha (α) 5% maka H_1 diterima, hal ini mengindikasikan bahwa model ini melanggar asumsi klasik autokorelasi |

Pada Tabel 4.6 hasil *Wooldridge test* menunjukkan bahwa dalam *Fixed effect model* (FEM) terindikasi model melanggar asumsi klasik berupa autokorelasi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *prob>F* (0,0028) kurang dari nilai tingkat signifikansi (α) 5%, dimana H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Setelah melalui beberapa pengujian yang terkait pengujian asumsi klasik meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah melanggar asumsi klasik. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan melakukan transformasi model asli sesuai dengan metode *generalized least square* (GLS).

4.8.3 *Generalized Least Square (GLS)*

Generalized Least Square (GLS) merupakan metode penyembuhan digunakan jika dalam penelitian melanggar asumsi klasik berupa heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Berikut hasil regresi dengan menggunakan *Generalized Least Square (GLS)*.

Tabel 4.7
Generalized Least Square (GLS)

| | Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi (PE) | | |
|--|---|--------------|---------|
| | Koofisien | z -statistik | Prob> z |
| Konstanta (_Cons) | 1.203172 | 1.60 | 0.109 |
| Derajat Desentralisasi Fiskal (DF) | 0.0686043 | 2.62 | 0.041 |
| Derajat Desentralisasi Fiskal² (DF2) | -0.0011611 | -2.05 | 0.028 |
| Investasi Pemerintah (INV_P) | 1.108798 | 2.05 | 0.040 |
| Rasio Gini (GINI) | 7.540191 | 2.98 | 0.003 |
| Rasio Gini Kuadrat (GINI2) | -6.160933 | -2.22 | 0.027 |
| Pendidikan (EDUC) | 0.0285498 | 3.36 | 0.001 |

Hasil estimasi dengan metode *generalized least square (GLS)* yang diperoleh untuk hubungan antara masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi (α) 5% menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi (DF), Investasi pemerintah (INV_P), Rasio Gini (GINI), dan Pendidikan (EDUC) memberikan pengaruh yang positif signifikan, sedangkan derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF2) dan rasio Gini kuadrat (GINI2) memberikan pengaruh yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur.

4.8.4 Pengujian Statistik

4.8.4.1 Uji F-statistik

Uji F-statistik pengujian yang digunakan untuk menentukan signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau keseluruhan. Hipotesis dalam uji F-statistik adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 \dots = \beta_n$$

H_1 : Paling tidak salah satu β tidak sama dengan nol

Hasil pengujian dalam uji F-statistik ini yaitu membandingkan antara F hitung dengan nilai F pada tabel. Apabila F hitung < F tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam persamaan tidak berpengaruh terhadap variasi dari variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika F hitung > F tabel atau nilai Prob. F-Stat menunjukkan angka kurang dari alpha 5%, maka H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dalam persamaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variasi variabel terikat.

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Models* (FEM), diperoleh hasil nilai probabilitas F-statistik adalah 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistik tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi pemerintah, rasio gini, rasio gini kuadrat dan pendidikan) secara signifikan mempengaruhi variabel dependen (pertumbuhan ekonomi).

4.8.4.2 Uji t-statistik

Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari variabel bebas secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikan dari variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variasi dari variabel terikat. Adapun hipotesis dalam uji t-statistik adalah sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 = 0, i = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Pada uji t-statistik dapat dilakukan dengan cara membandingkan t hitung yang terdapat pada hasil regresi dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung < t tabel ($prob\ t-stat > \text{tingkat signifikan} (\alpha)$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Begitu juga sebaliknya jika nilai t hitung > t tabel ($prob\ t-stat < \text{tingkat signifikan} (\alpha)$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Hasil pengujian dengan *fixed effect model* (FEM) yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 dengan nilai t-tabel 1,966 dan nilai t statistik masing-masing variabel, hasil menunjukkan nilai t hitung pada variabel derajat desentralisasi fiskal, rasio gini, rasio gini kuadrat dan pendidikan lebih besar dari t-tabel ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$) sehingga dapat disimpulkan masing-masing variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan derajat desentralisasi fiskal dan investasi pemerintah menunjukkan nilai t statistik lebih kecil dari nilai t-tabel. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas kurang dari tingkat signifikansi (α) 5%.

4.9 Analisis Hasil dan Pengujian Hipotesis

4.9.1 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman yang dilakukan, diperoleh *fixed effect model* (FEM) menjadi model yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Setelah *fixed effect model* (FEM) terindikasi melanggar uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi maka dilakukan penyembuhan model dengan menggunakan *generalized least square* (GLS) yang di tunjukkan pada Tabel 4.7. Persamaan model hasil pengujian dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = 1,20 + 0,06DF_{it} - 0,001DF^2_{it} + 1,10INV_P_{it} + 7,54GINI_{it} - 6,16GINI^2_{it} + 0,02EDUC_{it} + \mu_{it} \dots\dots\dots(4.1)$$

Dari hasil pengujian dengan model *fixed effect* diketahui nilai probabilitas ($prob > F$) sebesar 0,0000 yang menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R-square 0,2782 yang berarti bahwa 27,82% variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, sedangkan 72,18% diterangkan oleh variabel lain diluar model. Secara parsial dengan metode *generalized least square* (GLS) masing-masing variabel bebas yang meliputi derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi pemerintah, rasio gini, rasio gini kuadrat dan pendidikan dengan nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi 5%, menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

Pada persamaan diatas dapat diketahui bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal dengan nilai koefisien sebesar 0,06 yang berarti bahwa pada daerah dengan tingkat desentralisasi yang masih rendah, setiap peningkatan satu persen dari derajat desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 0,06% dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini diperkuat dengan nilai probabilitas variabel derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,009 yang menunjukkan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal ini memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pembuktian untuk menunjukkan hubungan *hump-shaped* seperti penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel desentralisasi fiskal kuadrat (DF^2) nilai koefisien dari hasil pengujian menunjukkan -0,001. Hasil koefisien dari DF^2 menunjukkan bahwa pada daerah dengan derajat desentralisasi yang lebih tinggi, setiap peningkatan derajat desentralisasi satu persen justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001%. Hasil ini membuktikan bahwa *hump-shaped relation* terjadi di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.

Variabel lain dalam penelitian ini adalah investasi pemerintah, investasi pemerintah menjadi salah satu variabel kontrol dengan nilai koefisien yaitu 1,10 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan investasi pemerintah yang berupa belanja modal pemerintah sebesar satu milyar rupiah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,10%. Jika dilihat dari nilai probabilitas, investasi memiliki probabilitas sebesar 0,040 dengan tingkat signifikansi 5% yang berarti

bahwa secara parsial investasi pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi *ceteris paribus*.

Rasio gini memiliki nilai probabilitas sebesar 0,003 dengan tingkat signifikansi 5%, maka variabel rasio Gini (GINI) berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien dari variabel rasio gini sebesar 7,54 yang berarti bahwa setiap kenaikan rasio gini sebesar satu satuan rasio Gini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,54%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio Gini berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota dengan asumsi *ceteris paribus*.

Rasio gini kuadrat memiliki nilai probabilitas sebesar 0,027 dengan tingkat signifikansi 5%, maka variabel rasio Gini kuadrat (GINI2) berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan nilai koefisien dari variabel rasio gini sebesar -6,1 yang berarti bahwa setiap kenaikan rasio gini yang melampaui batas maksimal sebesar satu satuan rasio Gini dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio Gini kuadrat tersebut berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan Kuznet dengan menggunakan kurva U-terbalik terbukti.

Selain investasi pemerintah dan rasio gini yang masuk sebagai variabel kontrol adalah pendidikan yang diukur dari persentase rata-rata angka melek huruf. Variabel pendidikan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,001 dengan tingkat signifikansi 5% yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien dari variabel pendidikan sebesar 0,02 yang berarti bahwa setiap kenaikan pendidikan melalui persentase rata-rata angka melek huruf sebesar satu persen dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02%. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan asumsi *ceteris paribus*.

4.9.2 Analisis Pembuktian *Hump-Shaped Relation*

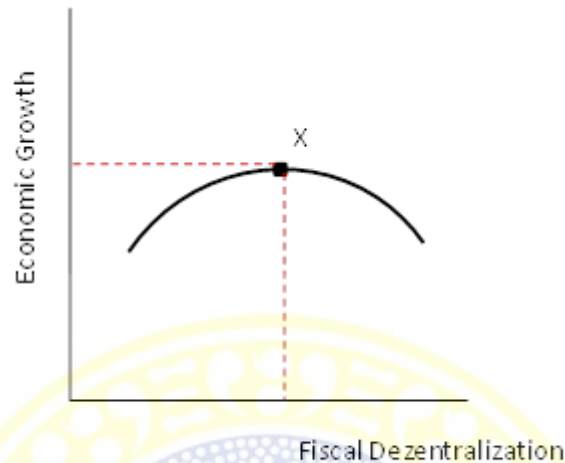
Setelah diketahui bahwa hasil koefisien dari variabel derajat desentralisasi (DF) menunjukkan pengaruh yang positif dan koefisien dari derajat desentralisasi fiskal kuadrat (DF^2) menunjukkan pengaruh yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa *hump-shaped relation* terjadi di kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

Persamaan kuadratik hubungan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = 1,20 + 0,06DF_{it} - 0,001DF^2_{it} + 1,10INV_P_{it} + 7,54GINI_{it} - 6,16GINI^2_{it} + 0,02EDUC_{it} \dots \dots \dots (4.2)$$

Dari persamaan 4.2 untuk menentukan bentuk grafik asumsinya yaitu grafik pada persamaan kuadratik terbuka kebawah jika nilai koefisien dari DF^2 menunjukkan hasil yang negatif, dan grafik terbuka keatas jika nilai koefisien dari DF^2 menunjukkan hasil yang positif. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai dari derajat desentralisasi kuadrat (DF^2) menunjukkan nilai yang negatif yaitu -0,001,

maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa grafik hubungan derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi terbuka ke bawah.



Gambar 4.7
Hubungan Desentralisasi Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi
(Hump-Shaped)

Setelah mengetahui hubungan derajat desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan grafik yang terbuka kebawah, selanjutnya penting untuk mengetahui titik maksimum (X) untuk menunjukkan hubungan terbalik (negatif) dimana setiap peningkatan derajat desentralisasi fiskal justru dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. metode yang digunakan untuk mengetahui titik maksimum yaitu menggunakan turunan pertama dari persamaan 4.2 sebagai berikut:

$$\frac{DPE}{DDF} = -0,002DF + 0,06$$

$$DF = 30 \text{ persen}$$

Setelah nilai derajat desentralisasi (DF) diketahui, maka selanjutnya mencari nilai titik pertumbuhan ekonomi (PE) dengan cara mensubstitusi hasil dari nilai DF pada

persamaan 4.2 dengan variabel investasi pemerintah, rasio gini, dan pendidikan dianggap konstan adalah sebagai berikut:

$$PE = 1,20 + 0,06DF - 0,0012DF^2 + 1,1INV_P + 7,54GINI - 6,16GINI^2 \\ + 0,02 EDUC$$

$$PE = 1,20 + 0,06(30) - 0,001(30^2)$$

$$PE = 2,1 \text{ persen}$$

Jadi nilai PE adalah 2,1 dan nilai derajat desentralisasi fiskal 30 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan terbalik dimana setiap peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan menurunkan pertumbuhan ekonomi jika nilai derajat desentralisasi fiskal lebih dari 30 persen tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan batas pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1 persen.

4.9.3 Analisis Pembuktian Kurva U-terbalik

Kuznet dalam penelitiannya menemukan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dengan menggunakan kurva U-terbalik *Curve* menunjukkan bahwa pada awal pembangunan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan mempunyai hubungan yang searah sehingga kurva bergerak naik (Gambar 2.2). Setelah mengalami peningkatan yang berlebih hingga titik puncak (*turning point*) pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbanding terbalik sehingga kurva bergerak mengalami penurunan.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kurva U-terbalik yang menunjukkan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat dibuktikan. Dengan menggunakan persamaan kudratik dengan mengkuadratkan variabel rasio Gini diperoleh bahwa koefisien rasio Gini positif dan nilai koefisien

rasio Gini kuadrat menunjukkan hasil yang negatif. Nilai rasio Gini kuadrat yang negatif menunjukkan bahwa kurva terbuka kebawah sesuai dengan *Kuznet Curve*.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu nilai maksimum pada *Kuznet Curve* tersebut. Titik maksimum dihitung dengan menggunakan turunan pertama dari persamaan 4.2 dengan menganggap variabel lain konstan adalah sebagai berikut:

$$\frac{DPE}{DGINI} = -12,2GINI + 7,54$$

$$GINI = 0,61$$

Setelah nilai titik koefisien Gini diketahui, maka selanjutnya mencari nilai titik pertumbuhan ekonomi (PE) dengan cara mensubstitusi hasil dari nilai koefisien Gini pada persamaan 4.2 dengan variabel derajat desentralisasi fiskal, investasi pemerintah, dan pendidikan dianggap konstan adalah sebagai berikut:

$$PE = 1,20 + 0,06DF - 0,0012DF^2 + 1,1INV_P + 7,54GINI - 6,16GINI^2 + 0,02 EDUC$$

$$PE = 1,20 + 7,54(0,61) - 6,16(0,61^2)$$

$$PE = 1,20 + 4,59 - 2,29$$

$$PE = 3,5$$

Dari hasil penghitungan diperoleh titik pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen dan nilai rasio gini 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan terbalik dalam kurva Kuznet U-terbalik menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang melampaui 3,5 persen koefisien Gini akan menurun di bawah 0,6. Implementasinya yaitu pada awal pertumbuhan sebelum mencapai pertumbuhan ekonomi 3,5 persen koefisien Gini terus mengalami peningkatan, seperti yang dijelaskan Kuznet, Barro (1999), dan Knowles (2001) bahwa

ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dan setelah mencapai titik puncak pembangunan, maka ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik.

4.9.4 Pengujian Hipotesis

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio gini, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode regresi panel data dengan *fixed effect model* dengan metode *generalized least square* maka diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

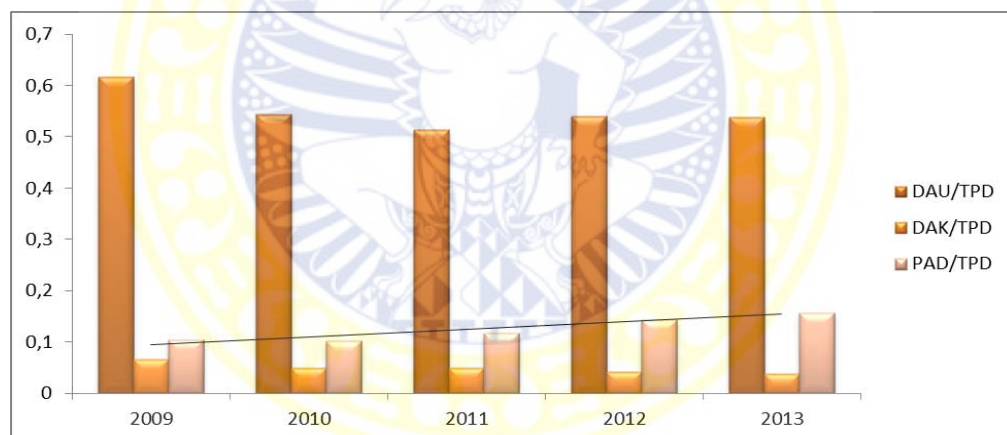
1. Berdasarkan hasil uji F-statistik menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, serta variabel kontrol (Investasi pemerintah, Rasio Gini, rasio gini kuadrat dan Pendidikan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan hipotesis yang ada sudah sesuai.
2. Berdasarkan hasil uji secara parsial diperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi pemerintah, rasio Gini, rasio Gini kuadrat dan pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil pengujian dengan hipotesis yang ada sudah sesuai.

4.10 Pembahasan

Secara umum pertumbuhan ekonomi daerah merupakan cerminan dari kinerja pemerintah daerah dari segala aspeknya. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah yang diinginkan, maka perlu adanya kebijakan pemerintah daerah sebagai penggerak peningkatan output daerah. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal salah satunya. Pada awal tahun 2001 merupakan titik awal diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia yang didasari dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi sumberdaya secara lebih efisien. Disisi lain, dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur segala urusan daerah kepada pemerintah daerah dengan maksud modal yang diberikan pemerintah pusat lebih tepat sasaran, sehingga daerah dapat berkembang dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Semakin besar dana transfer yang diberikan dari pemerintah pusat menunjukkan kemandirian fiskal daerah tersebut masih sangat rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah tinggi, sehinggadaerah tersebut mampu memenuhi belanja daerah dari sebagian besar PAD dan sebagian kecil dari dana transfer pemerintah pusat.

Penerimaan daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur selama pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menunjukkan angka ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat, khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tingkat ketergantungan daerah ini sebagai konsekuensi karena rendahnya kemampuan daerah khususnya di tingkat kabupaten/kota dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan jika dicermati kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) provinsi Jawa Timur masih sangat rendah dibawah 20 persen. Lebih jelasnya, berikut data rasio DAU,DAK, dan PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) di Jawa Timur tahun 2009-2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (diolah)

Gambar 4.8

Rasio Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Jawa Timur tahun 2009-2010

Pada Gambar 4.8 dijelaskan bahwa kontribusi pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah Jawa Timur melalui DAU dan DAK masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan pada Gambar 4.8, dimana rasio DAU terhadap TPD di atas 50 persen selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013. Di samping itu tingginya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah

Jawa Timur berupaya mengurangi angka ketergantungan tersebut dengan meningkatkan PAD masing-masing kabupaten/kota. Upaya tersebut dapat dibuktikan bahwa selama tahun 2009 hingga tahun 2013 PAD Jawa Timur meningkat dari 3,3 triliun rupiah pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mencapai 8,9 triliun rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur berupaya menggali sumberdaya yang ada di kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD Jawa Timur terlebih angka ketergantungan dari pemerintah pusat dapat menurun.

Hasil empiris berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa daerah dengan tingkat derajat desentralisasi yang masih rendah kabupaten/kota di Jawa Timur, setiap peningkatan derajat desentralisasi dapat memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada daerah dengan tingkat derajat desentralisasi yang sudah terlampaui tinggi melebihi titik puncaknya yaitu 30 persen, setiap peningkatan derajat desentralisasi justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa hubungan *hump shaped* juga terjadi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Asumsi hubungan *hump shaped* ini terjadi jika hasil koefisien hubungan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi positif signifikan dan koefisien derajat desentralisasi kuadrat terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan negatif. Hubungan *hump-shaped* terbukti dimana pada saat derajat desentralisasi masih rendah terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pada derajat desentralisasi yang lebih tinggi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004-2013 terbukti memiliki hubungan *hump-shaped* sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Thiessen (2003) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang di negara OECD tahun 1973-1998 hubungan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kuadrat. Hasil yang sama muncul dari penelitian Akai et al (2007) di 50 negara bagian Amerika pada tahun 1992-1998 yang menunjukkan hasil bahwa desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan *hump-shaped*. Zulyanto (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *hump-shaped relation* juga terjadi di provinsi Bengkulu yang artinya Artinya pada saat derajat desentralisasi fiskal belum terlampaui tinggi, maka kebijakan desentralisasi fiskal akan membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada derajat desentralisasi fiskal terlampaui tinggi, kebijakan desentralisasi fiskal justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian tidak hanya melihat pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi saja, tetapi memasukkan tiga variabel kontrol untuk mendukung penelitian yaitu investasi pemerintah, rasio Gini, rasio Gini kuadrat dan pendidikan yang diimplementasikan dengan angka melek huruf ditingkat kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara bersama-sama pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat dan ketiga variabel kontrol secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 27,82 persen, sedangkan 72,18 persen diterangkan oleh variabel lain di luar model.

Investasi merupakan salah satu variabel makro yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Peran pentingnya investasi salah satunya yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih tinggi sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang. Investasi menurut yang melakukan dibagi menjadi dua yaitu investasi swasta dan investasi pemerintah. Investasi pemerintah merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dalam taraf pembangunan. Besaran investasi pemerintah diimplementasikan dengan besaran belanja modal pemerintah. Hasil menunjukkan bahwa investasi pemerintah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Berarti bahwa setiap kenaikan satu milyar rupiah investasi pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebesar 1,1 persen. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), Jin dan Zou (2005), Thiessen (2003) menunjukkan bahwa investasi memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Gini juga menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis penelitian. Pengaruh rasio Gini terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan signifikan positif. Sedangkan rasio Gini kuadrat dari hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan. Hasil ini menunjukkan kebenaran kurva Kuznet U-terbalik yang menyatakan bahwa pada awal pembangunan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan mempunyai hubungan yang searah, dan setelah mengalami peningkatan yang berlebih hingga

titik puncak maka pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan berbanding terbalik seperti halnya hasil penelitian Barro (1999) dan Knowles (2001).

Hubungan rasio Gini dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur diperkuat dengan data empiris dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur yang menunjukkan bahwa rasio Gini di Jawa Timur berfluktuatif. Pada tahun 2010 rasio Gini mengalami penurunan yang sangat kecil yaitu 0,001, tahun 2011 justru mengalami peningkatan sebesar 0.046, tahun 2012 turun sebesar 0,003, dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,001. Jika dilihat trend rasio Gini dari tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan. Angka rasio Gini Jawa Timur tahun 2009 sebesar 0,31 dan pada tahun 2013 sebesar 0,35 dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 5,01 persen dan pada tahun 2013 mencapai 6,55.

Lebih rinci lagi pada tingkat kabupaten/kota, Kota Madiun dan Kota Blitar merupakan wilayah dengan rasio Gini selama tahun 2009 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan. Kedua wilayah tersebut jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan. Sedangkan kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Ponorogo, Situbondo, Probolinggo, Mojokerto, Magetan, dan Ngawi angka rasio Gini pada tahun 2010 menurun tetapi pada tahun berikutnya sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Di luar kabupaten/kota yang disebutkan di atas, angka rasio Gini menunjukkan lebih fluktuatif pada kurun waktu yang sama.

Begitu juga dengan variabel pendidikan yang dilihat dari persentase angka melek huruf di kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur. Koefisien variabel pendidikan menunjukkan 0,031 artinya setiap terjadi peningkatan angka melek huruf sebesar satu persen maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebesar 0,031 persen. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akai *et al* (2007) dimana hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan positif.

Berdasarkan data empiris persentase angka melek huruf di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 87,80 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2013 mencapai 89,28 persen. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota hampir secara keseluruhan pada kurun waktu yang sama angka melek huruf terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat buta huruf sangat baik, dan terus di tingkatkan melalui perbaikan layanan pendidikan, infrastruktur, serta fasilitas pendidikan yang lain dengan harapan angka buta huruf dapat berkurang.

BAB 5**KESIMPULAN DAN SARAN****5.3 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab empat mengenai pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama pengaruh derajat desentralisasi fiskal, derajat desentralisasi fiskal kuadrat, investasi, rasio Gini, rasio Gini kuadrat dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan 2013.
2. Secara parsial, pengaruh derajat desentralisasi fiskal secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh derajat desentralisasi fiskal kuadrat terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan negatif. Hal ini membuktikan bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan adanya hubungan *hump-shaped* yaitu pada kabupaten/kota dengan derajat desentralisasi fiskal yang masih rendah secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada kabupaten/kota yang memiliki derajat desentralisasi yang terlampaui tinggi, peningkatan derajat desentralisasi fiskal justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan ketiga variabel kontrol (investasi, rasio Gini, rasio Gini kuadrat dan Pendidikan) secara parsial menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang tepat yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah dengan kebijakan desentralisasi yang diterapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan belanja daerah dari kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
2. Diharapkan juga pemerintah daerah tidak hanya terfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi penting juga lebih diperhatikan masalah pemerataan distribusi pendapatan yang di terima oleh masyarakat. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh seiring distribusi pendapatan yang semakin merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., Nishimura, Y., & Sakata, M. (2007). Complementarity, fiscal decentralization and economic growth. *Economics of Governance*, 8(4).
- Amenan, Amrozi. (2014). Ekonomi Jatim Cenderung Melambat. Berita Satu. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/200856-ekonomi-jatim-cenderung-melambat.html>. Diakses Pada 02 Agustus 2016.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE).
- Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur. Laporan Kinerja Investasi di Jawa Timur 2015. <http://bpm.jatimprov.go.id>. Diakses pada 05 Juli 2016.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Angka Melek Huruf Jawa Timur 1999,2002,2004-2013. <http://jatim.bps.go.id>. Diakses Pada 23 Juni 2015
- Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2014. <http://jatim.bps.go.id>. Diakses Pada 23 Juni 2015
- Barro, R. J. (1999). Inequality, growth, and investment (No. w7038). *National bureau of economic research*.
- Brennan, G., & Buchanan, J. M. (1980). *The power to tax: Analytic foundations of a fiscal constitution*. Cambridge University Press.
- Breuss, F., & Eller, M. (2004). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Is there really a link?. *Journal for institutional Comparisons*, 2(1).
- Desai, R. M., Freinkman, L., & Goldberg, I. (2003). Fiscal federalism and regional growth: Evidence from the Russian Federation in the 1990s. *World Bank Policy Research Working Paper*, (3138).
- Ghozali, A. (2005). The Role of Education to Economic Growth. Paper Presented in international Seminar on "Towards A New Indonesia" held on 16-17 September 2005. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Glasson, J. (1997), *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gujarati, D.N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan. Salemba Empat. buku 2, Edisi 5. Jakarta

- Hidayat, Syarif. (2005). *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers
- Irawan dan M. Suparmoko. (1992). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jin, J., & Zou, H. F. (2005). Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China. *Journal of Asian Economics*, 16(6).
- Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fakultas Sospol Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Kamaluddin, R. (1998). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LPFE UI.
- Knowles, Stephen. (2001). Inequality and Economic Growth: The Empirical Relationship Reconsidered in the Light of Comparable Data. *Credit Research Paper No.01/03*. University of Nottingham
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pemerintah Daerah Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi:2005-2008 dalam Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andie, Era Baru Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Meier, Gerald M. (1989). *Leading Issues Economic Development*. 5th. Edition. New York: Oxford University Press
- Mishkin, F.S. (2012). *Macroeconomics Policy and Practice*, Pearson, Boston.
- Mustafa, B., & Halim, A. (2012). Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 7(4).
- Nopirin. (1996). *Pengantar Teori Ekonomi: Makro & Mikro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta.
- O'Callaghan, B.A. (2002). *Human Capital Accumulation and Economic Growth in Asia*. Nation Europe Centre. Paper No.30. Australian National University

- Oates, W. E. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National tax journal*, 46(2).
- Prijambodo, Bambang. (1995). Teori Pertumbuhan Endogen: Tinjauan Teoritis Singkat dan Implikasi Kebijaksanaannya. Perencanaan Pembangunan No.3.Pdf. Bappenas: Jakarta
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta
- (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta
- (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Sekretariat Negara. Jakarta
- (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Sekretariat Negara. Jakarta
- (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementrian Sekretariat Negara RI. Jakarta
- Romer, P. M. (1994). The origins of endogenous growth. *The journal of economic perspectives*, 8(1).
- Rosen, H.S. (1999). *Public Finance*. Mc-GrawHill Book Company. New York.
- Rosyidi, S. (1999). *Pengantar Teori Ekonomi; Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004). *Principle of Economics* (Elly, Anna Penerjemah), Edisi 17. Jakarta: Media Global Edukasi
- Siddik, M. (2009). Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999–2004. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi, Abimanyu A, Megantara A (eds) PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.*
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern; Perkembangan Pemikiran dari Klasik hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: LPFE UI
- Sumodiningrat, G, (1999). *Ekonometrika; Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko. (2001), *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Swasono, F. (2007). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 55(2).
- Tadjoeddin, M. Z., Suharyo, W. I., & Mishra, S. (2001). Regional disparity and vertical conflict in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 6(3), 283-304.
- Ter-Minassian, M.T. (1997). *Fiscal federalism in theory and practice*. International Monetary Fund.
- Thiessen, U. (2003). Fiscal decentralisation and economic growth in high-income OECD Countries. *Fiscal studies*, 24(3), 237-274.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3S: Jakarta
- Todaro, M., & Smith, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga
- Vazquez, J.M, & McNab, R. M. (2001). Fiscal decentralization and economic growth. *Georgia State Andrew Young School of Policy (ISP) Working Paper*, (01-01).
- Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1).
- Xie, D., Zou, H. F., & Davoodi, H. (1999). Fiscal decentralization and economic growth in the United States. *Journal of Urban Economics*, 45(2).
- Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of public economics*, 67(2), 221-240.
- Zulyanto, A. (2010). *Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

1. POOLED LEAST SQUARE (PLS)

| Source | SS | df | MS | | | |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|--|
| Model | 95.2567291 | 6 | 15.8761215 | Number of obs = | 380 | |
| Residual | 428.614094 | 373 | 1.14909945 | F(6, 373) = | 13.82 | |
| Total | 523.870823 | 379 | 1.38224491 | Prob > F = | 0.0000 | |
| | | | | R-squared = | 0.1818 | |
| | | | | Adj R-squared = | 0.1687 | |
| | | | | Root MSE = | 1.072 | |

| pe | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| df | .0686043 | .0263797 | 2.60 | 0.010 | .0167328 | .1204758 |
| df2 | -.0011611 | .0005726 | -2.03 | 0.043 | -.0022871 | -.0000352 |
| gini | 7.540191 | 2.55483 | 2.95 | 0.003 | 2.516516 | 12.56387 |
| gini2 | -6.160933 | 2.806042 | -2.20 | 0.029 | -11.67858 | -.6432882 |
| inv_p | 1.108798 | .544867 | 2.03 | 0.043 | .0374018 | 2.180194 |
| educ | .0285498 | .0085816 | 3.33 | 0.001 | .0116754 | .0454242 |
| _cons | 1.203172 | .7573069 | 1.59 | 0.113 | -.2859542 | 2.692298 |

2. FIXED EFFECT MODEL (FEM)

| Fixed-effects (within) regression | | | | Number of obs = | 380 |
|-----------------------------------|--------|----------------------|------|--------------------|-----|
| Group variable: kk | | | | Number of groups = | 38 |
| R-sq: within = | 0.2782 | Obs per group: min = | 10 | | |
| between = | 0.1721 | avg = | 10.0 | | |
| overall = | 0.1304 | max = | 10 | | |
| corr(u_i, Xb) = | | | | -0.8659 | |
| F(6,336) = | | | | 21.59 | |
| Prob > F = | | | | 0.0000 | |

| pe | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| df | .1045692 | .038516 | 2.71 | 0.007 | .0288063 | .1803321 |
| df2 | -.0009397 | .0006579 | -1.43 | 0.154 | -.0022338 | .0003545 |
| gini | 6.454693 | 2.248195 | 2.87 | 0.004 | 2.032383 | 10.877 |
| gini2 | -5.297244 | 2.403461 | -2.20 | 0.028 | -10.02497 | -.5695171 |
| inv_p | -.5874509 | .5603387 | -1.05 | 0.295 | -1.689665 | .514763 |
| educ | .1904725 | .0259438 | 7.34 | 0.000 | .1394398 | .2415051 |
| _cons | -12.99676 | 2.21036 | -5.88 | 0.000 | -17.34465 | -8.648872 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| sigma_u | 1.5380433 | | | | | |
| sigma_e | .83914388 | | | | | |
| rho | .77061168 | (fraction of variance due to u_i) | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--------------|------|------------|--------|
| F test that all u_i=0: | F(37, 336) = | 7.37 | Prob > F = | 0.0000 |
|------------------------|--------------|------|------------|--------|

LAMPIRAN 2

3. RANDOM EFFECT MODEL (REM)

| | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|---|--------|
| Random-effects GLS regression | | Number of obs | = | 380 |
| Group variable: kk | | Number of groups | = | 38 |
| R-sq: within = 0.2278 | | Obs per group: min | = | 10 |
| between = 0.1860 | | avg | = | 10.0 |
| overall = 0.1698 | | max | = | 10 |
| corr(u_i, X) = 0 (assumed) | | Wald chi2(6) | = | 91.62 |
| | | Prob > chi2 | = | 0.0000 |

| pe | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| df | .0659962 | .0323755 | 2.04 | 0.042 | .0025414 | .129451 |
| df2 | -.0008381 | .0006223 | -1.35 | 0.178 | -.0020578 | .0003817 |
| gini | 8.636499 | 2.214786 | 3.90 | 0.000 | 4.295598 | 12.9774 |
| gini2 | -7.335316 | 2.402928 | -3.05 | 0.002 | -12.04497 | -2.625664 |
| inv_p | .6516741 | .5127507 | 1.27 | 0.204 | -.3532987 | 1.656647 |
| educ | .0619165 | .0144581 | 4.28 | 0.000 | .0335792 | .0902537 |
| _cons | -1.901819 | 1.231963 | -1.54 | 0.123 | -4.316422 | .5127842 |

| | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| sigma_u | .63021193 | |
| sigma_e | .83914388 | |
| rho | .36062511 | (fraction of variance due to u_i) |

4. HAUSMAN TEST

| | --- Coefficients --- | | | |
|-------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| | (b) fixed | (B) random | (b-B) Difference | sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. |
| df | .1045692 | .0659962 | .038573 | .0208641 |
| df2 | -.0009397 | -.0008381 | -.0001016 | .0002134 |
| gini | 6.454693 | 8.636499 | -2.181806 | .3861369 |
| gini2 | -5.297244 | -7.335316 | 2.038072 | .0506376 |
| inv_p | -.5874509 | .6516741 | -1.239125 | .2259783 |
| educ | .1904725 | .0619165 | .128556 | .0215417 |

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
 = 38.71
 Prob>chi2 = 0.0000
 (V b-V B is not positive definite)

LAMPIRAN 3

UJI ASUMSI KLASIK

1. MULTIKOLINIERITAS

| Variable | VIF | 1/VIF |
|----------|------|----------|
| df | 9.97 | 0.100275 |
| gini | 9.70 | 0.103139 |
| df2 | 9.57 | 0.104491 |
| gini2 | 9.29 | 0.107620 |
| inv_p | 1.71 | 0.584523 |
| educ | 1.41 | 0.707189 |
| Mean VIF | 6.94 | |

2. HETEROSKEDASTISITAS

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model

H0: $\sigma(i)^2 = \sigma^2$ for all i

chi2 (38) = 1677.93
 Prob>chi2 = 0.0000

3. AUTOKORELASI

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

F(1, 37) = 8.305
 Prob > F = 0.0065

GENERALIZED LEAST SQUARE (GLS)

Coefficients: generalized least squares
 Panels: homoskedastic
 Correlation: no autocorrelation

Estimated covariances = 1
 Estimated autocorrelations = 0
 Estimated coefficients = 7
 Log likelihood = -562.0699

Number of obs = 380
 Number of groups = 38
 Time periods = 10
 Wald chi2(6) = 84.45
 Prob > chi2 = 0.0000

| pe | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|-----------|
| df | .0686043 | .0261356 | 2.62 | 0.009 | .0173795 | .119829 |
| df2 | -.0011611 | .0005673 | -2.05 | 0.041 | -.002273 | -.0000492 |
| gini | 7.540191 | 2.531189 | 2.98 | 0.003 | 2.579151 | 12.50123 |
| gini2 | -6.160933 | 2.780077 | -2.22 | 0.027 | -11.60978 | -.7120826 |
| inv_p | 1.108798 | .5398251 | 2.05 | 0.040 | .0507601 | 2.166836 |
| educ | .0285498 | .0085022 | 3.36 | 0.001 | .0118858 | .0452138 |
| _cons | 1.203172 | .7502993 | 1.60 | 0.109 | -.2673876 | 2.673731 |